



PERUBAHAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2018-2023

**DINAS KETAHANAN PANGAN PANGAN
KOTA BIMA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	41
1.3. Maksud dan Tujuan	43
1.4. Sistematisasi Penulisan	44
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	 46
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	46
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan	59
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	66
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	71
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 72
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	72
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	74
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Ketahanan	79
3.4. Penentuan Isu Strategis	87
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 89
4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	89
4.2. Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	92
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 103
5.1. Strategi	103
5.2. Arah Kebijakan	104
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 108
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 138
 BAB VIII PENUTUP	 140

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	Hubungan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat	6
Tabel. 1.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Perhiungan	9
Tabel. 1.3.	Casecading Dinas Ketahanan Pangan	21
Tabel. 2.1.	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2021	59
Tabel. 2.2.	Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	66
Tabel. 2.3.	Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per Desember 2019-2020	64
Tabel. 2.4.	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020	65
Tabel. 2.5.	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2020	66
Tabel. 2.6.	(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	68
Tabel. 2.7.	(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	69
Tabel. 3.1	Pemetaan Permasalahahn Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	73
Tabel. 3.2.	Visi Pemerintah Kota Bima	74
Tabel. 3.3.	Pokok Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima	75
Tabel. 3.4.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD, Tujuan Sasaran dan Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan	78
Tabel 3.5.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Sasaan Program Walikota dan Wakilwalikota Bima Tahun 2018-2023	79
Tabel. 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian/ Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024	80
Tabel. 3.7.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas	81
Tabel. 3.8.	Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima	82
Tabel. 3.9.	Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghamabat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya	85
Tabel. 3.10.	Arahan Program dalam Perwujudan Ketahanan Pangan Kota Bima	87
Tabel. 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023	91
Tabel. 4.2.	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2020,	93

	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	
Tabel. 4.3.	Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement	94
Tabel. 4.4.	Cut off point Indeks Ketahanan Pangan	95
Tabel. 4.5.	Alternatif Intervensi di Wilayah Kota	96
Tabel. 4.6.	Skor PPH yang dicapai pada tahun 2020	100
Tabel. 5.1	(Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023	103
Tabel. 5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023	105
Tabel. 5.3.	Keterkaitan sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023	106
Tabel. 6.1.	(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	110
Tabel. 6.2.	(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	118
Tabel. 7.1.	(Tabel T-C.6 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	138
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target SDGs	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1.	Keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1.2.	Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJPD Kota Bima	3
Gambar.1.3.	Integrasi Multisektor Ketahanan Pangan	4
Gambar 1.4.	Hubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 (Sasaran Strategis Cascading)	11
Gambar. 1.5.	Proses Bisnis RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 Pada Proses Bisnis Organisasi (Sasaran Strategis Cascading)	11
Gambar.1.6.	RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 (Indikator Kinerja Utama “Cascading”)	13
Gambar.1.7	CASCADING RENSTRA OPD Tahun 2019-2020 (Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007) TUJUAN : Meningkatnya Ketahanan Pangan	22
Gambar. 1.8.	CASCADING RENSTRA OPD 2021 (Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah) TUJUAN : Meningkatnya Ketahanan Pangan	17
Gambar. 2.1.	Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan	49
Gambar. 2.2.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.	61
Gambar. 2.3	Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan/Pangkat	68
Gambar. 2.4.	Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan	63
Gambar. 2.5.	Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Gambar. 3.1	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD	79
Gambar. 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	80
Gambar. 4.1.	Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	93
Gambar. 5.1	Pohon Kinerja/ Croscuting Pelayanan Ketahanan Pangan	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan ketahanan pangan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan ditetapkanya Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234), maka dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, juga menyesuaikan.

Tahapan perencanaan terdiri dari empat tahap: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, erumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bima juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan), Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 adalah:

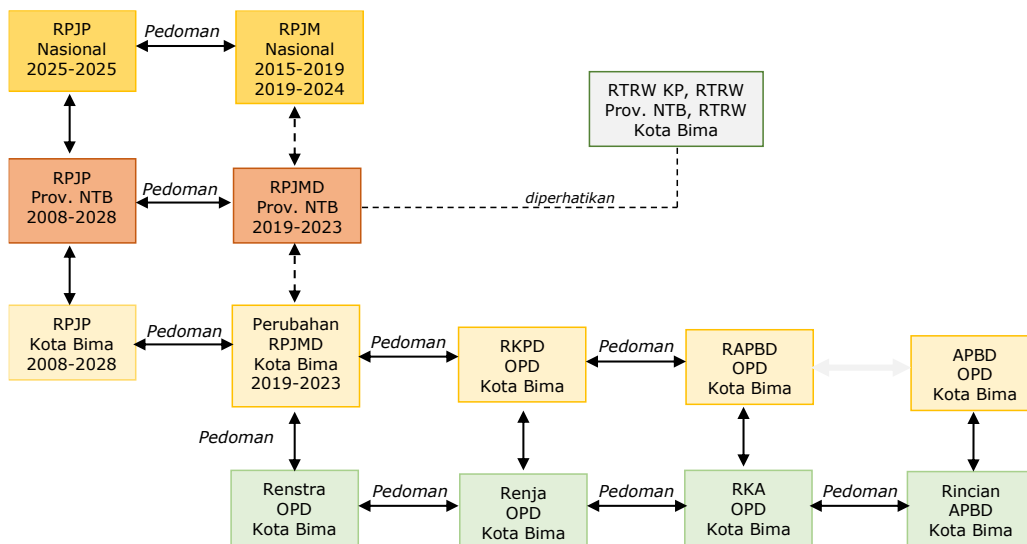
1. RPJMD Kota Bima memasuki tahun ke dua sehingga sisa masa RJMD masih tiga tahun.

2. Perubahan regulasi perencanaan penganggaran daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Terjadi perubahan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah, yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur kelembagaan, tugaspokok dan fungsi serta aspek tata laksana yang harus dilakukan penyesuaian;
4. Terjadinya wabah Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan perlu dilakukannya langkah-langkah yang strategis disemua aspek penyelenggaraan Pemerintahan sehingga telah dilakukan penyesuaian terhadap Prioritas Program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Virus Covid19;
5. Rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima.

Dengan berubahnya RPJMD, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra.

Gambar 1.1.

Keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2.

Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJPD Kota Bima



Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.1. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RENSTRA Badan Ketahanan Pangan Pusat.

Bahwa perencanaan pembangunan di daerah tidak lepas dari perencanaan pembangunan di pusat atau selaras. Karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Badan Ketahanan Pangan Pusat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang tertuang pada RENSTRA BKP Pusat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam merencanakan pembangunan di daerah khususnya pembangunan ketahanan pangan daerah Kota Bima sesuai dengan kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi payung besar dari

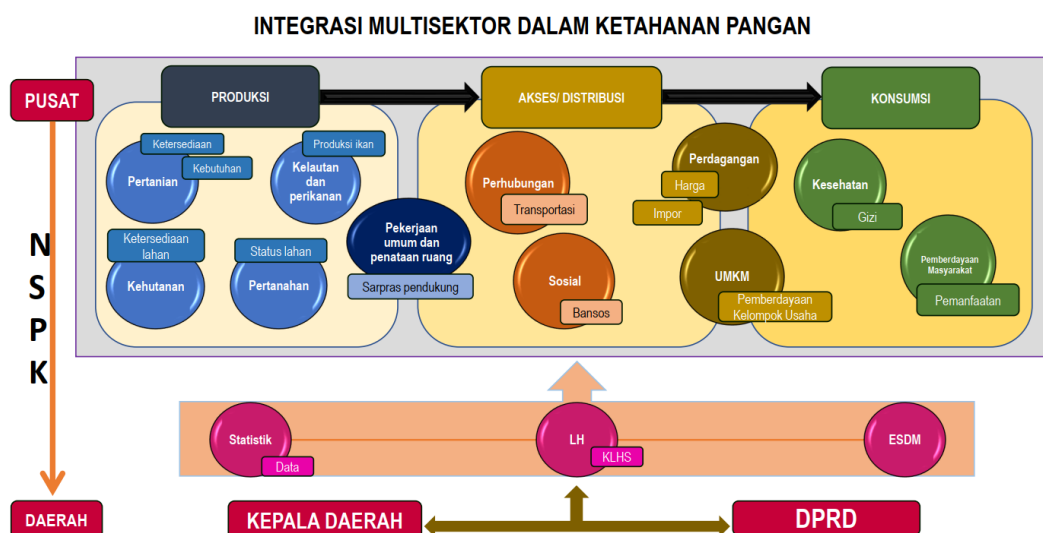
rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Dan menjadi bagian dalam perencanaan BKP Pusat untuk mendukung keberhasilannya.

Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui *misi Kementerian Pertanian yaitu*:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu “*Mewujudkan Ketahanan Pangan*”. (*Sumber Data Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024).

Gambar.1.3.
Integrasi Multisektor Ketahanan Pangan



1.1.2. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RENSTRA Provinsi NTB

Rencana Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi permasalahan dan isu strategis pembangunan propinsi lima tahunan yang tertuang dalam agenda Membangun NTB Gemilang menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi bagian perencanaan pada Dinas Ketahanan pangan Kota Bima.

Untuk mendukung misi kementerian pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung misi ke-5 yaitu “NTB Sejahtera dan

Mandiri” dengan tujuan *“Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang Beragam”*

1.1.3. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima.

Gambaran hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RPJMD dapat digambarkan dengan

POHON KINERJA (CASCADING):

a. Sasaran Strategis Cascading

Gambar/ diagram hubungan/ keterkaitan Renstra OPD dan RPJMD pada Tujuan dan Sasaran OPD, seperti yang tergambar pada Gambar 1. dibawah ini.

Upaya Dinas Ketahananann Pangan Kota Bima dalam mewujudkan Misi Pertama RPJMD/ Misi Walikota dan Wakil walikota terpilih 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat hubungan Proses Bisnis Organisasi dengan level tertinggi antara Eseleon II dan pimpinan daerah.

b. Indikator Kinerja Utama “Cascading”

Gambar/ diagram hubungan/ keserasian Renstra OPD dan RPJMD pada Tujuan dan Sasaran OPD yang digambarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal.

Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. Indikator Kinerja Utama atau IKU merupakan upaya eselon II dalam mencapai Sasaran RPJMD yang menjadi Tujuan OPD yang ter ukur.

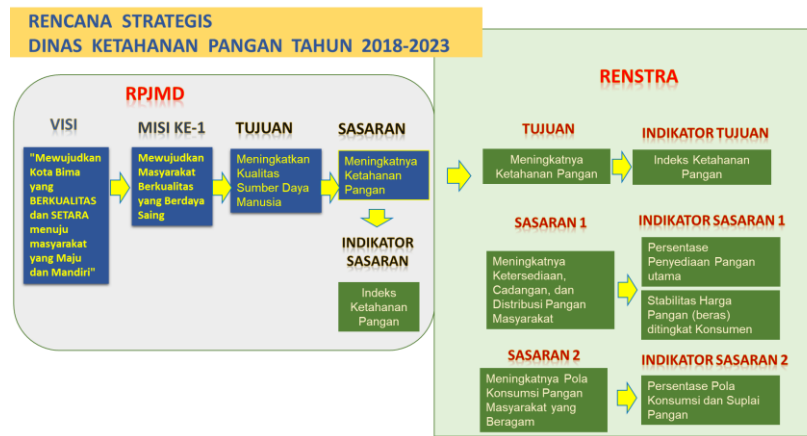
Tabel.1.1

Hubungan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat

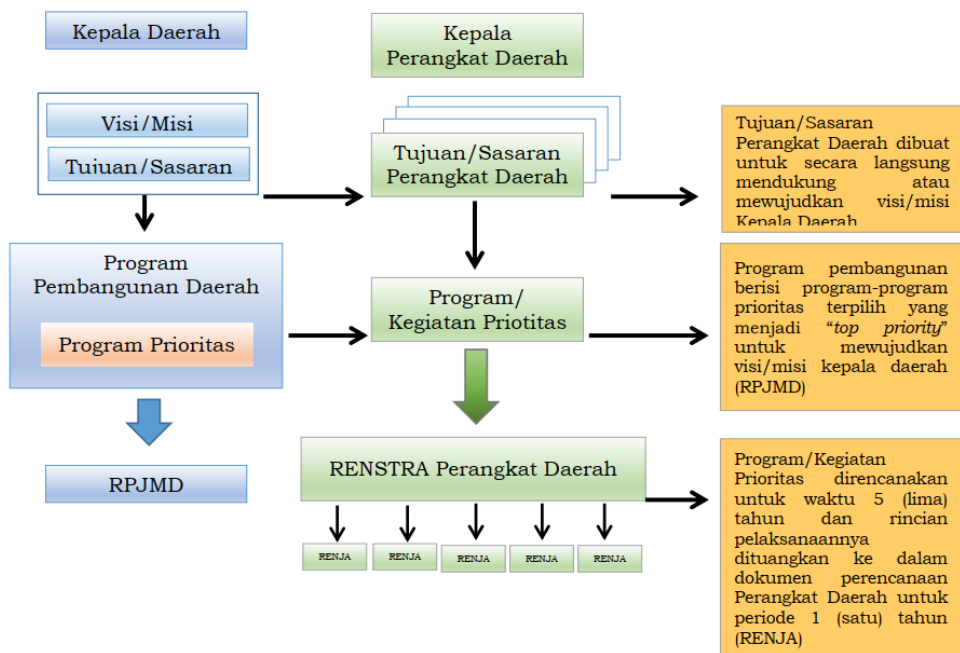
Badan Ketahanan Pangan				RPJMD 2013-2023					Renstra PD 2013-2023	
Misi	Pokok-pokok Visi		Misi	Visi	Misi I	Tujuan Daerah	Sasaran Kota	Indikator Sasaran	Sasaran PD	Indikator Sasaran
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan	1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; 2. Menurunkan jumlah penduduk rawan 3. Memperkuat sistem distribusi pangan; 4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; 5. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.	Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Stabilitas Harga
	2. Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal							2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang keragaman	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
	3. Kemandirian Pangan	Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat								

Sumber Data : Renstra BKP Pusat; RPJMD 2019-2024

Gambar 1.4. Hubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 (Sasaran Strategis Cascading)



Gambar. 1.5. Proses Bisnis RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 Pada Proses Bisnis Organisasi (Sasaran Strategis Cascading)



Gambar.1.6. RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 (Indikator Kinerja Utama “Cascading”)



Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan proses penjabaran dan penyelarasan IKU dan target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Pada gambar 2 diatas menggambarkan IKU di level daerah (Walikota dan Wakil Walikota) dan IKU level OPD (Eselon II).

Formulasi perhitungan Indikator Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel.1.1.

Tabel 1.2 . Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Perhiungan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
SASARAN OPD						
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan = $\frac{\sum \text{Cadangan Pangan}}{\sum \text{Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$ Definisi: 1. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 2. Jumlah ketersediaan pangan di Kota Bima adalah hasil penjumlahan dari CPP Kota Bima, Cadangan Pangan di masyarakat, Lumbung pangan di masyarakat (LPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Penggilingan/Pengusaha, Persediaan Beras Perum Bulog Sub Devisi Wilayah Kota Bima (GBB> Jatiwangi) yang menjadi kewenangan Kota Bima.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi	Ketersediaan Energi (Kkal/ Kapita/ Hari) = $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari}}{100} \times \text{Kandungan Kalori X BDD}$ Angka Ketersediaan Energi: - Adalah dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan energi pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. - BDD = Bagian yang Dapat Dimakan - Ketersediaan pangan per Kkal/ Kapita/ Hari sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan - Standar ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari Sumber : Neraca Bahan Makanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan milik dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. - Tersedianya cadangan pangan pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota minimal 100 ton ekuivalen beras - Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras b. Cadangan Pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga, termasuk, petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga. - Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala local dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan luar.		Angka ketersediaan protein	Ketersediaan pangan/kapita/hari $\frac{\text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$ Angka Ketersediaan Protein, Adalah dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan Protein pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. BDD = Bagian yang Dapat Dimakan Sumber : Neraca Bahan Makanan Sumber Data: Data Konsumsi dari Susenas BPS; Data Produksi Tanaman Pangan; Data Impor dan Ekspor; Data Produksi Perkebunan, peternakan, perikanan; Data Stok diperoleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog); Data Jumlah Penduduk BPS; Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		• Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras ditingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal; • Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala local dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan luar. c. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok. • LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), jumlah ketersediaan pangan (beras) di LDPM • Penggilingan/pengusaha, ketersediaan pangan (beras) di penggilingan yang berada di Kota Bima d. Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima (GBB.Jatiwangi) yang menjadi peruntukan Kota Bima.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	$\frac{\sum \text{Kelurahan Rawan/ rentan pangan}}{\sum \text{kelurahan yang ditangani}} \times 100 \%$ Kelurahan rawan/rentan pangan adalah kelurahan yang ditetapkan melalui hasil perhitungan dan analisis Peta Rawan/Rentan Pangan (Peta FSVA) sebagai daerah yang masuk kedalam kategori rawan/rentan pangan.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	$\frac{\sum \text{sampel yang aman hasil uji}}{\sum \text{sampel yang diambil}} \times 100 \%$	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	3. Kebutuhan Pangan adalah: Kebutuhan pangan adalah jumlah konsumsi per kapita per tahun yang menjadi standar Provinsi NTB adalah 120 kg di kalikan dengan jumlah penduduk Kota Bima Tahun N. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Kebutuhan Pangan Utama Kota Bima = Konsumsi Per Kapita Tahun X Σ Penduduk Std. Deviasi Harga Pangan CV = $\frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$ Pengertian: Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil. Definisi Opresional: 1. Harga dinyatakan stabil jika gejala harga di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 % untuk beras. 2. Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan Pokok Strategis menggambarkan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.				

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	3. Std. Deviasi Harga Pangan adalah nilai statistik harga pangan yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data harga pangan dari suatu sampel statistik harga pangan dengan data mean atau rata-rata harga pangan. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan, adalah nilai rata harga pangan pada tahun berjalan. Dari kumpulan data sama dengan 0 menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut yakni sama. Sedangkan nilai deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata – rata nya. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan adalah: rata-rta harga pangan beras dalam satu tahun. % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Definisi: 1. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu				Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		2. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah, upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraanekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. 3. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencukupi jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. 4. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. 5. Cara Perhitungan Rumus Nilai capaian peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya Skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.				

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		Nilai capain peningkatan = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH = $\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi msing-masing komoditas} \times 100\%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$ 6. Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015-2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram. 7. Penilaian terhadap Konsumsi Pangan Penduduk secara kuantitas dapat ditunjukan melalui volume Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari). a. Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun) dihitung dengan menjumlahkan bahan pangan per jenis komoditas, baik bentuk asal maupun olahannya untuk bahan pangan olahan, sebelum dijumlahkan, terlebih				

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		dahulu dikonversikan ke bentuk asalnya menggunakan angka konversi yang telah ditetapkan. b. Total Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energy setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energy setiap jenis pangan tersebut. c. Total Konsumsi Protein Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi protein penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi protein setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi				

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	6	7	8	9
		protein masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan protein setiap jenis pangan tersebut.				

1.1.4. Hubungan RENSTRA dengan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota. Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) OPD.

Pada Gambar berikut (Gambar. 4) menampilkan penjabaran Cascade Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran Strategis (IKU) ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (pada level eselon II, eselon III dan IV).

Pada tabel. 1.1. menggambarkan Cascading perencanaan strategis tingkat Pemerintah Kota Bima maupun pada perangkat Daerah.

Gambar.1.7. CASCADING RENSTRA OPD Tahun 2019-2020
(Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007)
TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Pangan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN
1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat 2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
		Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan
		Pengembangan Diversifikasi Tanaman
		Pengembangan Sumber Daya Pangan
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
		Pelaksanaan Sitem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
		Pembinaan produk pangan berbahan baku lokal
		Pembinaan dan Monitoring Ketersediaan Pangan Masyarakat
		Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
		Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)
	Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa
		Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
		Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
		Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)
		Penyelenggaraan Promosi Produk Pangan Lokal
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Gambar. 1.8. CASCADING RENSTRA OPD 2021
(Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)
TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Pangan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGARAN
1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat 2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	53.234.400
			2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32.470.200
			3. Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	63.109.700
			4. Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	33.145.100
		2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	41.890.600
			2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	18.762.500
			3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	58.800.000
		3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	31.099.920
			1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	825.487.600
	2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	677.549.600
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	58.008.000
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	58.008.000
			Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	17.850.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	42.014.000

Tabel 1.3. Casecading Dinas Ketahanan Pangan

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARGET	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	63,53 %	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	63,53 %	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase penyediaan Pangan Utama	22	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat	Angka ketersediaan energi	2.632 kka/kap/hari	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tercukupinya ketersediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Persentase jumlah pangan pokok dan pangan lainnya yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	20%	181.959.400
								Angka ketersediaan protein				66,68 gram / kap/hari	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya Dokumen IHP dan NBM	Jumlah dokumen IHP dan NBM	2 Dokumen		
								Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkatkan (CV ≤ 10%)	<10		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya penyediaan dan pembinaan produk pangan olahan	Jumlah kelompok masyarakat / pengusaha pangan olahan yang terbina	10 Kelompok	32.470.200			
								Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam			Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	87,0				Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Tersedianya data harga pangan pokok	Data Komoditi per bulan (komoditi) (17 Komoditi per bulan)
													Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien (PUPM dan TTI)	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang terfasilitasi	4 LDPM, 1 PUPM	33.145.100	

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya keseimbangan cadangan pangan Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	15 Ton	150.553.020
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2 kali	41.890.600
														Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	1 dokumen	18.762.500
														Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah)	Penguatan Cadangan Pangan Daerah (15 Ton)	15Ton	58.800.000
														Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan yang terpelihara	15 ton	31.099.920

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARGET	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
														Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi	2,161,5 kka/ kap/ hari	825.487.600
														Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis PPH	1 dokumen	677.549.600
															Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan	10 klp	
														Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya lomba B2SA dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba B2SA Tingkat Kota Bima	41 Kelurahan	147.938.000
										PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	25%	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	10 kelurahan	20.229.200

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARGET	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
														Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	2 Keg	20.229.200
										PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	85%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	Jenis pangan segar yang diawasi	80%	117.872.000
														Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang mutu dan keamanan pangan (kelompok)	11 Kelompok	58.008.000
														Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Kota	Jumlah petani/ pelaku usaha yang di Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan	25 petani/ pelaku usaha	17.850.000
														Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah alat uji pangan	Jumlah alat uji pangan	1 Unit	42.014.000
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN, PENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA																		

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
										PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkat nya capaian pelaksana an kegiatan penunjang urusan pemerinta h daerah	Persenta se rata- rata hasil capaian pelaksana an kegiatan penunjan g urusan pemerint ah daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.297.100
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2.424.400
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianny a Dokumen RKA	1 dokum en	561.000
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P	1 dokum en	561.000
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokum en	508.900
														Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokum en	541.200
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Koordinasi	Jumlah laporan	2 dokum	1.700.600

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja SKPD	en	
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.072.940.117
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	39 Orang	2.984.876.417
														Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%	84.560.000
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan/ Dokumen	2.546.700
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Semester	957.000

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaa n kegiatan Adminstras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	476.500
														Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokum en	476.500
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaa n kegiatan administrasi Kepegawaia n Perangkat daerah	100%	4.992.200
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya	30 Stel	0
														Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	30 PNS	0
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaa n kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	196.113.3 00

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	1.749.300
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	28.985.400
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan makanan dan minuman	250 orang/kali	20.033.200
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	26.047.400
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan kerjasama Dengan Media	5 Media	5.400.000
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 kali	113.898.000
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.188.795
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	500 surat	54.900.000
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan kebersihan kantor	4 Jasa/bulan	29.089.800
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis	4.198.995
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51.571.960
														Penyediaan Jasa	Terlaksananya	Jumlah	1 Unit	20.881.65

N O	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARG ET	TUJUAN OPD	INDIKAT OR TUJUAN	TARG ET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARG ET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKAT OR PROGRA M	TARG ET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T	ANGGARA N
														Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan		0
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	2.850.000
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terpelihara	3 Jenis	4.750.000
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang direhab/ dipelihara	50 Persen	23.090.310

Tabel 1.4. Casecading Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun	Target Tujuan					Realisasi			Sasaran															Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			2019	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	Target Sasaran					Realisasi Sasaran					2019	2020					2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

32

1.1.5. Hubungan RENSTRA dengan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Kementerian/Lembaga maupun di daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan meliputi mencakup tujuan dan strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan baik skala nasional maupun skala daerah. Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) strategi.

Pembangunan Ketahanan Pangan dalam hal ini yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan mengambil bagian dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) strategi, Dinas Ketahanan Pangan mendukung Tujuan Nomor 12 “ **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan**”. Dengan Strategis:

- a. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- b. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah;
- c. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut;
- d. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur;
- e. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Klps/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
20. Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bima dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
- b. Memberikan landasan operasional secara resmi dan arah pembangunan ketahanan pangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bima, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil dengan rencana yang ditetapkan;
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Memudahkan seluruh jajaran dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun didasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran

Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

- d. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234);
- e. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- f. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketahanan pangan dengan arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dan menyesuaikan rencana perubahan program di bidang teknis agar lebih terarah dan terukur pada pemangku jabatan yang menjadi kewenangan khususnya pada eselon III.
- g. Hasil evaluasi Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
- h. Hasil evaluasi Inspektorat Kota Bima;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB	III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
	3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB	IV.	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
	4.2.	Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
BAB	V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor) dan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Berikut pelayanan dasar bidang ketahanan Pangan yang harus dilaksanakan:

Gambar.2.1.
Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan



2.1.1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : 1) produksi dalam daerah, 2) pemasokan pangan, dan 3) pengelolaan cadangan pangan.

2.1.2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat

memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Dengan strategi penguatan system logistic daerah, stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen, perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan, Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Daerah (di Bidang Pangan)).

2.1.3. Pelayanan Penganekaragaman konsumis dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Strategi yang dilakukan adalah dengan:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
 - Pangan **beragam** artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi.
 - **Bergizi** artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh.
 - **Seimbang** artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku.
 - **Aman** artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.
2. Peningkatan Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Keamanan Pangan terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Upaya yang dilakukan adalah dengan penguatan system jaminan mutu pangan; peningkatan kapasitas

system pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan; dan pembinaan dan pengawasan pangan.

2.1.4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Pelayanan Kerawanan pangan dan gizi dilakukan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Amanat UU Pangan kepada pemerintah adalah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi salah satunya terkait sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan standar fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : 1) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 2) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, 4) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya.

Strategi yang dilakukan untuk pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah: Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; Perluasaan akses informasi kerawanan pangan dan gizi

2.1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melakukan pelayanan dasar bidang ketahanan Pangan berikut tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:

Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016

Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

TUGAS POKOK

Menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan, rumusan kebijakan, pengendalian, pembinaan administrasi, dan evaluasi kebijakan beserta pelaksanaannya dalam lingkup ketatalaksanaan, kelembagaan, serta pengembangan kinerja dan sumber daya aparatur

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekertaris

Tugas :

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas

Fungsi :

- a. Pengordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c) Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e) Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g) Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketahanan pangan;
- d) Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
- e) Pengupulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g) Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h) Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan;

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan bahan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, superfiisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang sumber daya pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- d. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kerawanan Pangan.

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Penyiapan bahan intervensi daerah arawan pangan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- f. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi:

1. Seksi Distribusi pangan;

1. Seksi distribusi Pangan:

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, penkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Harga Pangan dan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan prognosis neraca pangan;
- f. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Cadangan Pangan.

Tugas:

Penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyusunan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang, konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

1. Seksi Konsumsi Pangan;

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; dan

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;

- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan pangan lokal;
- j. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Keamanan Pangan.

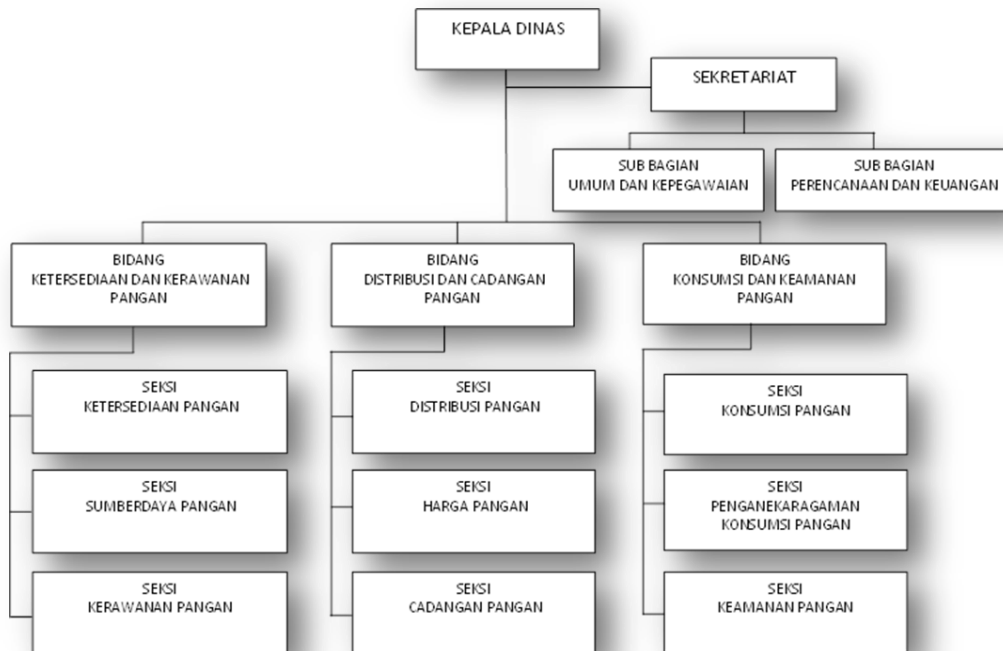
Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

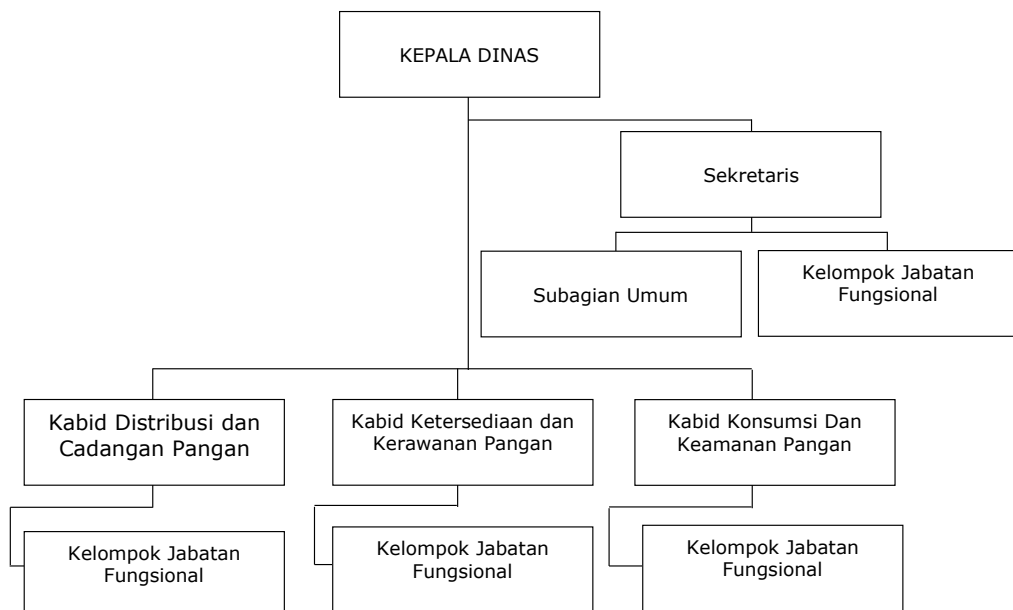
Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar.2.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.



- A. Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.



2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

1. Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima hanya memiliki pegawai struktural tidak memiliki pegawai Fungsional.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki pegawai sebanyak 24 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 15 orang Pegawai Non PNS.

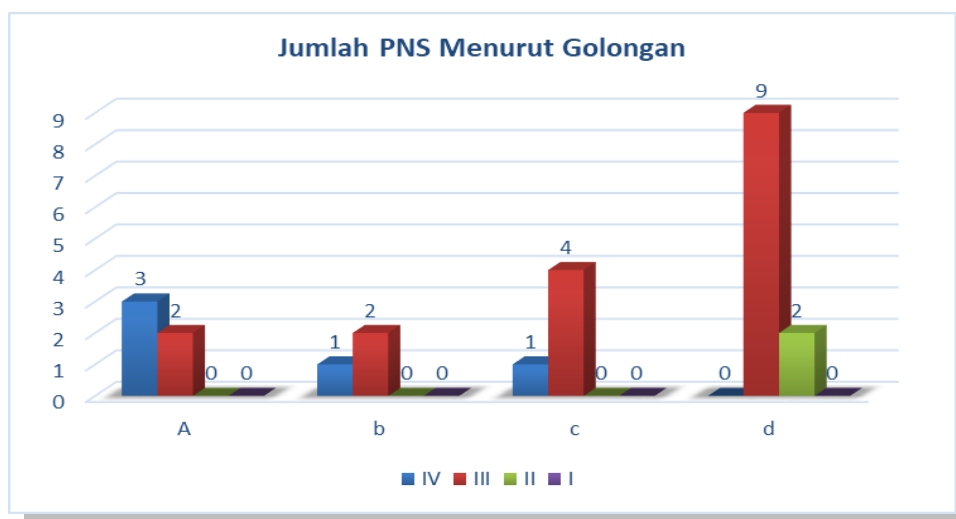
Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terdiri dari :

Tabel 2.1.

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2021

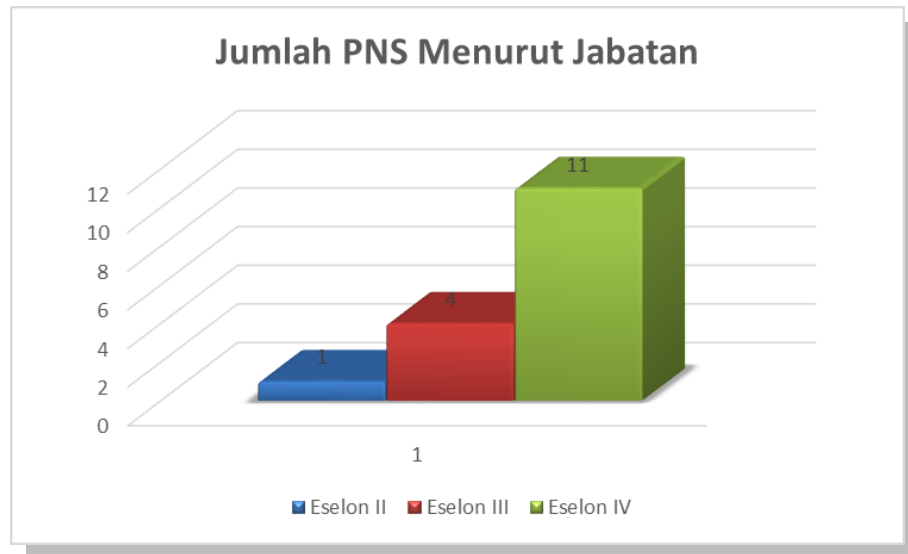
Golongan/ Pangkat	A	b	c	d	Jumlah	%
IV	3	1	1	0	5	20,83 %
III	2	2	4	9	17	70,83 %
II	0	0	0	2	2	8,33 %
I	0	0	0	0	0	0 %
JUMLAH	5	3	5	11	24	

Gambar. 2.3. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan/Pangkat



2. Berdasarkan Jabatan

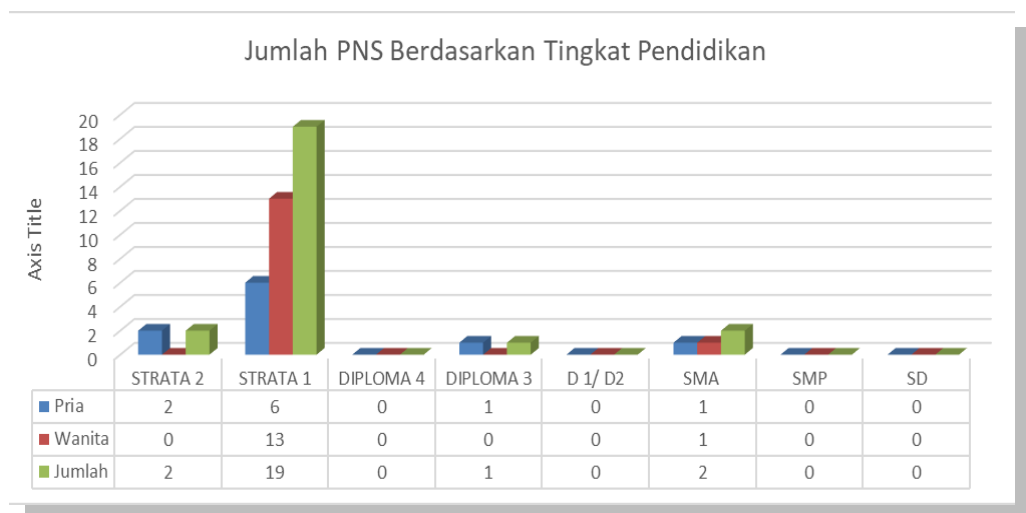
Gambar. 2.4. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan



Dari tabel pegawai berdasarkan golongan dan pangkat terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima didominasi oleh pegawai bergolongan III sebanyak 70,83 %.

2. Berdasarkan Pendidikan

Gambar. 2.5. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari Gambar 2.4 terlihat bahwa PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tingkat pendidikan Strata-2 berjumlah 2 orang, Strata-1 berjumlah 19 orang, Diploma III berjumlah 1 orang, dan tamat SMU/ sederajat berjumlah 2 orang.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai pria di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebanyak 10 orang atau 42 %, dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 14 orang atau 58 % dengan demikian jumlah pegawai wanita di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melebihi standar/komposisi anjuran pemerintah yaitu sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan pegawai.

Selain didukung oleh pegawai PNS, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dibantu oleh 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

Dalam lima tahun ke depan masih terdapat kebutuhan pegawai sesuai dengan rincian analisis jabatan yang ada. Jumlah pegawai yang ada saat ini dan kebutuhan berdasarkan usulan Rencana SOTK Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester I Tahun 2021)	Tenaga Kontrak	Kurang-/ Lebih
1	2	3	4	5	6=3-4/35
212	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	1	1		0
	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan				
213	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	1	1		0
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan				
214	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	1	1		0
	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan				
215	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1		0
	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
216	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	1		0
	Seksi Ketersediaan Pangan				
217	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	1	1		0
	Seksi Sumberdaya Pangan				
218	Kepala Seksi Sumberdaya Pangan	1	1		0
	Seksi Kerawanan Pangan				0
219	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	1	1		0
	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan				0
220	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1		0

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester I Tahun 2021)	Tenaga Kontrak	Kurang-/ Lebih
1	2	3	4	5	6=3-435
	Seksi Distribusi Pangan				0
221	Kepala Seksi Distribusi Pangan	1	1		0
	Seksi Harga Pangan				
222	Kepala Seksi Harga Pangan	1	1		0
	Seksi Cadangan Pangan				
223	Kepala Seksi Cadangan Pangan	1	1		0
	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
224	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1		0
	Seksi Konsumsi Pangan				
225	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	1	1		0
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan				
226	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	1		0
	Seksi Keamanan Pangan				
227	Kepala Seksi Keamanan Pangan	1	1		0
B.	Jabatan Fungsional, Pelaksana dan Jabatan Lainnya				
1732	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	1			1
1733	Analisis Ketahanan Pangan Muda	1			1
	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan				
1734	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1		0
1735	Pengelola Kepegawaian	1	1		0
1736	Pranata Kearsipan	1			1
1737	Sekretaris				0
1738	Pengadministrasi Umum	1		2	-1
1739	Pengemudi			1	-1
1740	Pramu Kebersihan			1	-1
1741	Petugas Keamanan			1	-1
1742	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1			1
1743	Bendahara	1	1		0
1744	Pengelola Gaji	1	1		0
1745	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1			1
1746	Pengolah Data Laporan Keuangan	1			1
1747	Pengadministrasi Keuangan	1			1

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester I Tahun 2021)	Tenaga Kontrak	Kurang-/ Lebih
1	2	3	4	5	6=3-435
	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
1748	Analisis Pangan	1			1
1749	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1
1750	Pengadministrasi Umum	1	1	3	-3
1751	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan				0
1752	Penyuluh Pangan	1			1
1753	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1
1754	Pengelola Pola Pangan Harapan	1			1
1755	Pengolah Data	1			1
					0
	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan				
1756	Analisis Pangan	1			1
1757	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	1			1
1758	Pengelola Pemasaran	1			1
1759	Pengawas Harga Pangan	2	2		0
1760	Pengolah Data	1			1
1761	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1
1762	Pengelola Gudang	1			1
1763	Pengadministrasi Umum			3	-3
1764	Penyuluh Pangan				0
	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
1765	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1			1
1766	Pengelola Pola Pangan Harapan	1			1
1767	Pengadministrasi Umum	1	1	4	-4
1768	Pengolah Data	1			1
1769	Pengelola Panganekaragaman Pangan	1			1
1770	Analisis Pangan	1			1
1771	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	1			1
1772	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	1			1
	Jumlah	51	23	15	13

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa kinerja 23 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima bisa ditangani oleh 23 pegawai ditambah dengan 15 tenaga kontrak.

2.2.2. Sumber Daya Sarana rasarana

Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan efektif, agar sumberdaya yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah barang milik daerah atau yang biasa dikenal dengan aset daerah. Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Aset Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai Dinas Ketahanan Pangan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Aset yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per Desember 2020 adalah senilai Rp.1.759.173.179,89. Aset tersebut terdiri dari posisi BMD di Neraca yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3. Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per Desember 2019-2020

No.	Akun	Saldo Per 31 Desember 2019	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Aset Tetap		
	a. Tanah	3.575.000,00	3.575.000,00
	b. Peralatan dan Mesin	1.172.120.733,31	1.219.344.533,31
	c. Gedung dan Bangunan	1.757.075.375,90	1.757.075.375,90
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.500.000,00	11.500.000,00
2.	Aset Lainnya	-	-
3.	Akumulasi Penyusutan	(1.229.104.229,32)	(1.058.336.679,32)
	JUMLAH	1.759.173.179,89	1.882.716.929,89

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.4 Aset tetap yang dimiliki dinas terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset yang ada tersebut tidak semuanya dalam kondisi baik, dari total aset tersebut terdapat aset yang merupakan aset rusak berat/ usang senilai Rp.204.460.500,33, serta masih ada kebutuhan aset yang belum terpenuhi. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Ketahanan Pangan pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan Internet, dan mesin faksimili;

3. Perangkat komputer (laptop dan PC) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer , dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, air conditioner (AC), kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

Berikut tabel rekapitulasi dukungan sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:

Tabel. 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi (lengkap, kurang, mencukupi)
1.	Meja ½ Biro	29	Kurang Mencukupi
2.	Kursi Tamu / Sofa	1	Kurang Mencukupi
3.	Laptop Note Book	15	Kurang Mencukupi
4.	PC Unit	3	Kurang Mencukupi
5.	Printer	8	Kurang Mencukupi
6.	Kursi Tunggu	1	Kurang Mencukupi
7.	Scanner	1	Kurang Mencukupi
8.	Proyektor	2	Kurang Mencukupi
9.	Kamera	3	Kurang Mencukupi
10.	Alat pendingin/AC	4	Kurang Mencukupi
11.	Lemari Es/Kulkas	1	Kurang Mencukupi
12.	Kipas Angin	5	Kurang Mencukupi
13.	Televisi	1	Kurang Mencukupi
14.	Mobil Dinas	1	Kurang Mencukupi
15.	Sepeda Motor	8	Kurang Mencukupi
16.	Gps	1	Kurang Mencukupi
17.	Filling Besi / Metal	4	Kurang Mencukupi
18.	Kursi Kerja Pegawai	26	Kurang Mencukupi
19.	Kursi Putar	9	Kurang Mencukupi
20.	Peti Uang	1	Kurang Mencukupi
21.	Kursi Kerja Esellon III	5	Kurang Mencukupi
22.	Meja Rapat	6	Kurang Mencukupi
23.	Papan Visual	4	Kurang Mencukupi
24.	Rak Piring	1	Kurang Mencukupi
25.	Handycam	1	Kurang Mencukupi
26.	Warlees	1	Kurang Mencukupi
27.	Ups	1	Kurang Mencukupi
28.	Harddis	3	Kurang Mencukupi
29.	Lemari Kaca/ Etalase	5	Kurang Mencukupi
30.	Mesin Pompo Air	1	Kurang Mencukupi
31.	Mesin Pemotong Rumput	1	Kurang Mencukupi

Sumber: Sekretaiaat Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima (2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

2.3.1. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Tabel.2.5 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2020

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Rincian Pelayanan
1.	Sekretariat	- Administrasi	- Pejabat dan staf di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
		- Pelayanan surat menyurat	- Mitra pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan
		- Data, rencana kerja, anggaran dan evaluasi internal	
2.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pelayanan Ketersediaan Pangan	- Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan
			- Mengkaji ketersediaan dan kebutuhan pangan
			- Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggilingan yang mudah diakses jika terjadi gejolak harga dan pasokan
		Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan	- Penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi Kota Bima
			- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
			- Penanggulangan kerawanan pangan melalui intervensi bantuan sosial berdasarkan hasil investigasi Tim SKPG
			- Menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
3.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Pelayanan Dasar Distribusi dan Cadangan Pangan	- Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
			- Melakukan pengumpulan data/ informasi dan menganalisis harga, distribusi dan akses pangan
			- Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan
			- Menyediakan informasi yang mencakup:
			- Kondisi harga pangan ditingkat produsen dan konsumen (harian/ mingguan/ bulanan)
			- Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan
			- Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil dll)
			- Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke konsumen
		Pelayanan Dasar Cadangan Pangan	- Informasi kondisi cadangan pangan di Kota Bima
			- Pengembangan cadangan pangan pemerintah
4.	Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pelayanan Konsumsi Pangan	- Masyarakat non sentra produksi pangan
			- Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan, penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Rincian Pelayanan
			Workshop penanganan keamanan pangan segar. Dengan kelompok sasaran pelaku usaha
			Informasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
		Pelayanan Keamanan Pangan	Pembinaan keamanan pangan, kepada pelaku usaha
			Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha
			Pemantauan keamanan pangan segar

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Hasil kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 2017-2018 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.6.
(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(7)	(18)	(19)	(20)
1.	Ketahanan Pangan																		
1.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				-	-	-	90,00	95,30	-	-	-	90,00	95,30				100	100
1.2	Persentase peningkatan ketersediaan pangan Utama				-	-	-	0	5%	-	-	-	0	5%				0	100
1.3	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan				-	-	-	84,9	85,4	-	-	-	84,9	85,4				100	100
1.4	Jumlah Ketersediaan Energi				-	-	-	2.231,6	2.266,7	-	-	-	2.231,6	2.266,7				100	100
1.5	Jumlah ketersediaan protein				-	-	-	96	93,99	-	-	-	96	93,99				100	100
1.6	Penguatan Cadangan Pangan				-	-	-	0	5	-	-	-	0	5				100	100
1.7	Jumlah konsumsi energi kkal/ kap/ hari				-	-	-	2.189	2.190	-	-	-	2.189	2.190				100	100
1.8	Persentase mutu keamanan pangan							80	80				80	80				100	100

Tabel 2.7.

(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	-5	-6	-10	-11	-15	-16	-17	-18
BELANJA	3.752.516.330,12	4.289.699.403,24	3.538.668.809	4.026.333.961	94,30%	93,86%	12,52%	12,11%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.822.504.330	1.759.699.403,24	1.781.851.776	1.648.536.845	97,77%	93,68%	-3,57%	-8,09%
BELANJA LANGSUNG	1.930.012.000,00	2.530.000.000,00	1.756.817.033	2.377.797.116	91,03%	93,98%	23,71%	26,12%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISIRASI PERKANTORAN	697.006.600	661.134.900	600.651.902	598.307.786	86,18%	90,50%	-5,43%	-0,39%
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.932.200	156.600.000	73.485.000	156.591.000	98,07%	99,99%	52,15%	53,07%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	58.400.000	37.200.000	39.071.784	15.470.795	66,90%	41,59%	-56,99%	-152,55%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	13.767.800	13.767.800	2.804.800	6.677.800	20,37%	48,50%	0,00%	58,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44.388.000	46.488.000	42.930.000	46.488.000	96,72%	100,00%	4,52%	7,65%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	40.000.000	39.775.000	39.238.500	99,44%	98,10%	0,00%	-1,37%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	55.000.000	43.927.000	38.840.000	67,58%	70,62%	-18,18%	-13,10%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.580.000	22.260.000	62.460.000	10.780.000	99,81%	48,43%	-	-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	34.000.000	25.834.200	23.700.000	25.688.500	69,71%	99,44%	-31,61%	7,74%
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	278.938.600	228.054.900	247.538.318	225.598.191	88,74%	98,92%	-22,31%	-9,73%
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25.000.000	35.930.000	24.960.000	32.935.000	99,84%	91,66%	30,42%	24,21%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.490.000	141.890.000	82.331.731	88.547.102	60,32%	62,41%	3,81%	7,02%
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	46.490.000	53.890.000	45.331.500	53.800.000	97,51%	99,83%	13,73%	15,74%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000	28.000.000	25.076.231	21.777.602	83,59%	77,78%	-7,14%	-15,15%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000	40.000.000	5.424.000	8.254.500	18,08%	20,64%	25,00%	34,29%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	20.000.000	6.500.000	4.715.000	21,67%	23,58%	-50,00%	-37,86%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.000.000	31.000.000	24.786.000	30.580.000	99,14%	98,65%	19,35%	18,95%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	25.000.000	31.000.000	24.786.000	30.580.000	99,14%	98,65%	19,35%	18,95%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	12.950.000	10.000.000	12.950.000	9.250.000	100,00%	92,50%	-29,50%	-40,00%
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.950.000	10.000.000	12.950.000	9.250.000	100,00%	92,50%	-29,50%	-40,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA&KEUANGAN	133.500.000	151.100.000	133.500.000	151.100.000	100,00%	100,00%	11,65%	11,65%
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	8.000.000	25.600.000	8.000.000	25.600.000	100,00%	100,00%	68,75%	68,75%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	-5	-6	-10	-11	-15	-16	-17	-18
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	832.415.400	1.474.875.100	811.577.000	1.440.210.628	97,50%	97,65%	43,56%	43,65%
Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	76.565.000	-	76.350.000	-	99,72%	0,00%	#VALUE!	#VALUE!
Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	26.175.000	51.875.000	26.175.000	51.384.000	100,00%	99,05%	49,54%	49,06%
Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	25.410.400	38.400.000	25.410.000	37.461.600	100,00%	97,56%	33,83%	32,17%
Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	26.750.000	101.565.000	26.750.000	100.332.600	100,00%	98,79%	73,66%	73,34%
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	77.695.000	141.765.000	77.382.000	136.288.000	99,60%	96,14%	45,19%	43,22%
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	37.600.000	269.935.000	37.600.000	268.927.218	100,00%	99,63%	86,07%	86,02%
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	55.790.000	422.720.000	53.060.000	416.342.108	95,11%	98,49%	86,80%	87,26%
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	64.540.000	74.250.000	64.435.000	73.788.000	99,84%	99,38%	13,08%	12,68%
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	89.240.000	65.840.000	88.790.000	65.555.000	99,50%	99,57%	-35,54%	-35,44%
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	26.800.000	22.950.000	26.800.000	22.765.263	100,00%	99,20%	-16,78%	-17,72%
Kegiatan Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	40.950.000	60.367.000	40.850.000	56.600.000	99,76%	93,76%	32,16%	27,83%
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	51.275.000	45.157.100	42.985.000	42.572.100	83,83%	94,28%	-13,55%	-0,97%
Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	23.675.000	67.250.000	23.665.000	58.829.000	99,96%	87,48%	64,80%	59,77%
Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	165.000.000	58.981.000	156.815.000	58.981.000	95,04%	100,00%	-179,75%	-165,87%
Kegiatan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	44.950.000	53.820.000	44.510.000	50.384.739	99,02%	93,62%	16,48%	11,66%
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	92.650.000	60.000.000	91.020.400	59.801.600	98,24%	99,67%	-54,42%	-52,20%
Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Pertanian Unggulan Daerah	92.650.000	60.000.000	91.020.400	59.801.600	98,24%	99,67%	-54,42%	-52,20%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang menjadi dinamika tersendiri dalam rangka mewujudkan pencapaian Misi Pertama RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 “satu yaitu “Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing”. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang dimaksud:

2.4.1. Tantangan

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi;
- b. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
- c. Akses pangan masyarakat yang tidak merata;
- d. Permasalahan gizi;
- e. Perubahan Iklim global;
- f. Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi;
- g. SDM Pertanian, Regenerasi petani lambat.
- h. Food loss and waste yang tinggi.

2.4.2. Peluang

- a. Adanya kebijakan regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota yang mendukung pembangunan ketahanan pangan;
- b. Meningkatnya IPM, Peningkatan angka IPM nasional mendorong perubahan pola konsumsi.
- c. Tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan komperatif;
- d. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
- e. Semakin mudahnya kelompok masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan dan dapat membuka peluang dalam mengembangkan kegiatan usahanya;
- f. Kota Bima memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- g. Banyaknya instansi yang terlibat dalam penanganan ketahanan pangan;
- h. Keanekaragaman produk pangan lokal dari hulu hingga hilir dalam bentuk olahan.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat. Tumbuhnya ekonomi diupayakan dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat masyarakat dan pembangunan usaha berbasis pertanian. Capaian kinerja lainnya yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk mendukung peningkatan pembangunan sumber Daya Manusia menuju masyarakat yang sejahtera.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kota Bima selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kota Bima:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi PNS.	- Persentase PNS berpendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan - Jumlah PNS bersertifikasi teknis masih sedikit - Kesesuaian pendidikan dan jabatan masih perlu ditingkatkan	Kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein	1. Perlunya data ketersediaan pangan 2. Keterbatasan sumber daya pangan 3. Masih adanya daerah rawan pangan
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah.	1. Harga pangan strategis yang fluktuatif. 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 3. Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
		Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	1. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. 3. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal di Kota Bima
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	1. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar. 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran produsen tentang keamanan pangan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman.
		Perlunya jaminan mutu pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1. Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Bima merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kota Bima yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

3.2.1. Visi

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah :

Tabel 3.2: Visi Pemerintah Kota Bima

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"	Kota Bima yang Berkualitas	terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sector pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

3.2.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundangan kepada Pemerintah Kota Bima, maka terdapat 5 Pokok

Visi yang diturunkan menjadi Misi Pemerintah Kota Bima seperti tertera dalam Tabel Berikut:

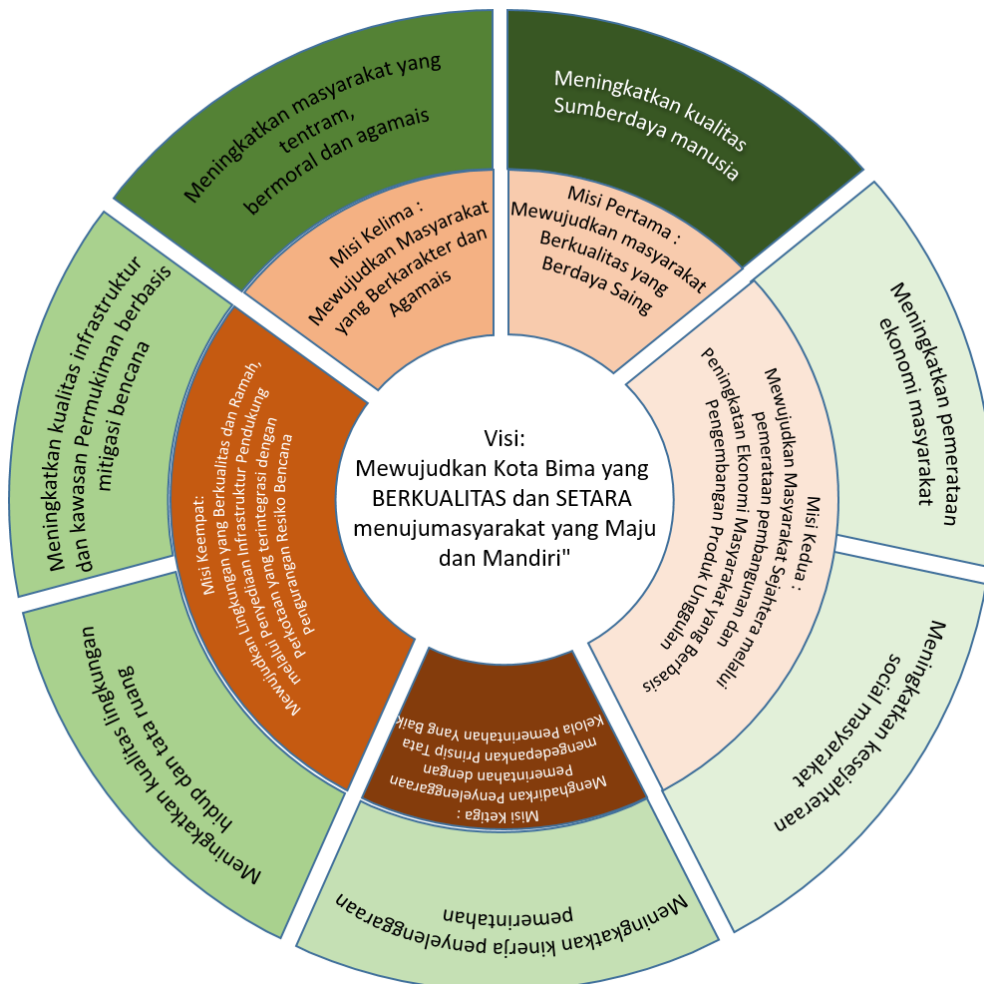
Tabel 3.3. Pokok Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima

Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	• Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. • Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima • baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
Transparan dan Akuntabilitas	Misi Ketiga : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Lingkungan Perkotaan yang Ramah	Misi Keempat: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
Masyarakat Agamais	Misi Kelima : Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hokum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

3.2.3. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan ekonomi dari 5 misi utama Pemerintah Kota Bima, berikut keterkaitannya dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bima seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar. 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

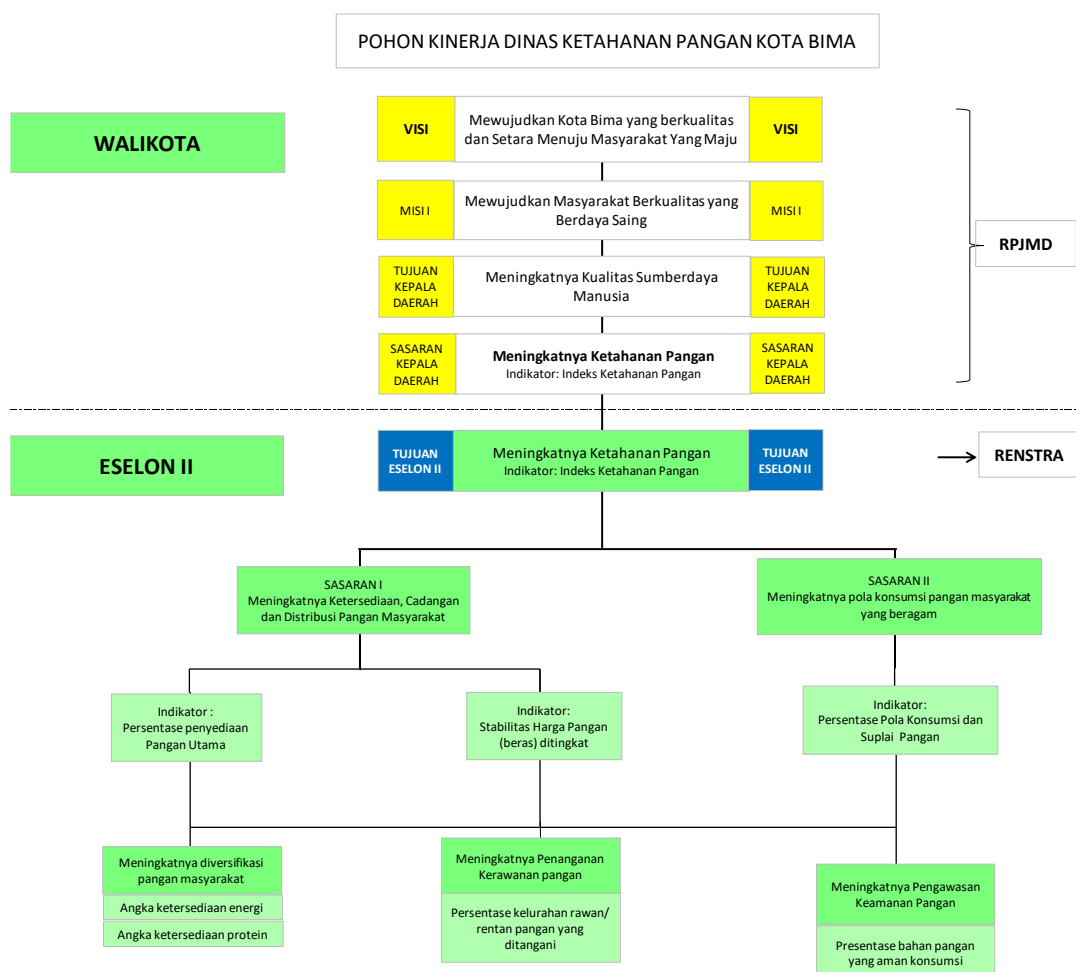


Sumber: RPJMD Kota Bima 2018-2023

Dalam setiap perspektif, dilakukan pengukuran atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2023, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD atau dokumen pendukung lainnya.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta indikatorr kinerja beserta Target tahunan dari Tujuan Pemerintah Kota Bima dengan Resntra Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima



Tabel. 3.4.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD, Tujuan Sasaran dan Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan

RPJMD *)						Renstra Dinas Ketahanan Pangan															
Visi	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan OPD					SASARAN OPD	IKU OPD	Satuan	Target	Target Sasaran				
								2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri	Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	63,00	63,50	63,58	63,60	63,65	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	25	18	20	22	24	25
														Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkatkan konsumen (CV ≤ 10%)							
													Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragama n	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan							

Sumber data *): RPJMD

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan (Meningkatnya Ketahanan Pangan) sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasai untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Sasaan Program Walikota dan Wakilwalikota Bima Tahun 2018-2023

visi RPJMD 2018-2023: Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri				
Misi RPJMD 2018-2023: ke-1: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing				
Sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023: Meningkatnya Ketahanan Pangan				
No	Program Walikota dan Wakilwalikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	- Kualitas SDM masih terbatas - Kualitas koordinasi antar sektor, baik top daown bottom up belum sepenuhnya optimal. - Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi - Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	- Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD - Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan kota.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran utama RENSTRA Badan Ketahanan Pangan periode 2020-2024 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah

- spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;
- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2020)

Tabel. 3.6.

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian/ Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKP Pusat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	- Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; - Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; - Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2020)	- Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	- Kualitas SDM masih terbatas - Kualitas koordinasi antar sektor, baik top down bottom up belum sepenuhnya optimal. - Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi - Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	- Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD - Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan kota.

3.3.1. Telaahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Katahanan Pangan Kota Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
• Meningkatnya Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis; • Meningkatnya Stabilitas Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis; • Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	• Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal • Belum optimalnya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	• Tersediannya pangan lokal • Gudang penyimpanan tersedia • Adanya dukungan program kegiatan pusat dan provinsi • Jalur distribusi pangan lincer
	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	• Penganekaragam pangan belum optimal • Masih belum idealnya PPH Ketersediaan • Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi • Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi. • Masih tingginya kesadaran tentang keamanan pangan dimasyarakat.	• Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu lahan pertanian keluarga. • Partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok • Adanya Pelatihan yang terintegrasi • Perlunya Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, karang taruna dan Dasa Wisma dalam mendorong pemanfaatan pekarangan berkelanjutan
		• Kualitas SDM masih terbatas • Kualitas koordinasi antar sektor, baik top down bottom up belum sepenuhnya optimal. • Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi • Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	• Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD • Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan kot

3.3.1.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Pengembangan ruang Kota Bima mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain; Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Bima tidak terlepas dari penataan ruang diatasnya. Berdasarkan RTRWN, Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan berdasarkan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima merupakan simpul dari pertumbuhan Pulau Sumbawa bagian Timur yang memiliki hinterland wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Lapangan Sera Suba sampai Kawasan Pantai Amahami dan Pelabuhan Laut. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan sekitar Lewirato dan penatoi yang merupakan pusat pemerintahan serta Kawasan sekitar Lapangan Pahlawan sebagai sub pusat pelayanan kota. Sedangkan pusat pelayanan lingkungan meliputi Kelurahan Manggemaci, kelurahan Kodo, Kelurahan Kumbe, kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, kelurahan Kolo.

Tabel 3.8.
Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima

Hirarki dan sistem kota-kota			
Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Lingkungan
Raba – Bima	- Kecamatan Rasanae Barat - Sebagian Kecamatan Asakota - Sebagian Kecamatan Mpunda	Di Kecamatan Mpunda: Kel. Penatoi Kel. Sadia Kel. Sambinae Kecamatan Raba: Kel. Rabangodu Timur Kel. Rabangodu Utara Kel. Rabadompul Barat Kecamatan Rasane Timur: Kel. Oi Fo'o dan Kel Nitu	Kel Jatiwangi Kel. Mande Kel. Jatibaru Kel. Santi Kel. Kodo Kel. Kolo

Sumber: Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012

Disamping tujuan umum tersebut, penataan ruang wilayah Kota Bima juga memiliki beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan Kota Bima sebagai pusat kegiatan wilayah di bagian timur Pulau Sumbawa melalui pengalokasian ruang secara efektif

dan efisien bagi kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan industri.

2. Menciptakan keseimbangan alokasi pola ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan.
3. Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan perkotaan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam perkotaan yang terkendali.
4. Menetapkan kawasan-kawasan strategis kota yang mampu menjamin berlangsungnya fungsi lindung terhadap lingkungan maupun kawasan yang dapat menjadi mesin penggerak laju pertumbuhan ekonomi wilayah
5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang maupun ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kota Bima dalam memanfaatkan potensi ruang dan lahan yang ada.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan program pembangunan Ketahanan Pangan terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah.

Mengacu kepada RPJMD Kota Bima Tahun 2029-2023. Hasil telaahan KLHS menunjukkan bahwa yang menjadi isu strategis di Kota Bima adalah:

1. Kemiskinan
 - a. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.
 - b. Terbatasnya modal usaha bagi UMKM sebagai akibat sulitnya mendapatkan akses permodalan terutama pada lembaga keuangan formal;
 - c. Rendahnya skill / keterampilan berusaha bagi pelaku usaha (UMKM) dan pencari kerja;
 - d. Rendahnya kreativitas pelaku usaha yang berdampak pada terbatasnya inovasi;
 - e. Masih terbatasnya akses pada penyediaan Rumah Layak Huni terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah;
 - f. Masih rendahnya akses terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap pelayanan umum di bidang kesehatan dan infrastruktur dasar (Air Minum dan Sanitasi);
 - g. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat.
1. Ketahanan Pangan, Asupan Gizi dan Pertanian Berkelanjutan
 - a. Masih terbatasnya pemahaman ibu/orang tua akan pentingnya gizi dan ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan kualitas balita;
 - b. Angka kekurangan gizi (underweight) pada anak balita masih relatif tinggi;

- c. Angka stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun / baduta masih tinggi;
 - d. Belum ada regulasi yang mengatur kawasan pertanian / pangan berkelanjutan;
 - e. Belum ada kebijakan khusus yang mengatur peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
2. Air bersih dan sanitasi
- a. Keterbatasan ketersediaan Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan perkotaan;
 - b. Masih kurangnya jaringan transmisi air baku;
 - c. Masih kurangnya Instalasi pengolahan air;
 - d. Tingginya nilai kebocoran air pada jaringan perpipaan;
 - e. Semakin berkurangnya jumlah titik mata air dan daerah tangkapan air yang mengalami degradasi;
 - f. Jaringan perpipaan yang buruk dan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Bima; Belum tersedia SPAL (IPAL) terpusat dan SPAL setempat;
 - g. Belum tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan SPAL (IPAL);
 - h. Belum ada BUMD Pengelola Air Minum (PDAM).
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- a. Produksi dan produktivitas pertanian belum optimal;
 - b. Skala/kapasitas usaha masyarakat masih rendah;
 - c. Belum tersedia regulasi yang mengatur kemudahan berusaha;
 - d. Terbatasnya Skill / keterampilan berusaha;
 - e. Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dan pencari kerja terutama pada lembaga Keuangan formal;
 - f. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana perekonomian;
 - g. Belum tersedia sarana Diklat untuk peningkatan skill/keterampilan berusaha;
 - h. sarana prasarana destinasi wisata yang masih terbatas.
4. Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Tangguh
- a. Terbatasnya sarana prasarana kemitigasian;
 - b. Terbatasnya aparatur kemitigasian dan penanganan kebencanaan;
 - c. Kelurahan tangguh bencana masih berada pada level pratama;
 - d. Peralatan sistem peringatan dini kebencanaan, mulai dari sistem peringatan dini gerakan tanah / tanah longsor, banjir/curah hujan sampai tsunami belum tersebar secara merata di seluruh lokasi rawan bencana (jumlahnya terbatas);
 - e. Terbatasnya sarana prasarana penanganan persampahan baik untuk skala lingkungan maupun skala kota, seperti Amrol, Dump Truck, Gerobak Sampah, dan Kontainer;
 - f. Terbatasnya jumlah SDM pengelola persampahan;
 - g. Terbatasnya lahan untuk penempatan kontainer sampah;
 - h. Belum optimalnya pelaksanaan pola Sanitary Landfill dalam pengelolaan persampahan di TPA;
 - i. Terbatasnya lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau;

- j. Belum tersedia regulasi yang mengatur pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Selain output yang diharapkan, program pembangunan daerah juga tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup. Hal ini dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selanjutnya menjadi acuan dan terintegrasi kedalam RPJMD Kota Bima yang dijabarkan dan didukung oleh program OPD yang tertuang dalam RENSTRA OPD.

Tabel 3.9.
Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Penjelasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan pertanian tanaman pangan di Kota Bima meliputi: Kecamatan Mpunda	Semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap	Tersedianya pelaku usaha pertanian; Masih
		seluas 303 Ha, Kecamatan Rasanae Timur seluas 463 Ha, Kecamatan Raba seluas 489 Ha, Kecamatan Asakota seluas 121 Ha. Kawasan peternakan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Adapun kawasan peternakan ini menyebar disemua kecamatan yang ada di Kota Bima dengan komoditi unggulan sapi.	tahun; Alih fungsi kawasan peruntukan pertanian ke non pertanian; Penyediaan kawasan khusus pertanian membutuhkan dana yang besar	tersedianya lahan yang memadai; Pemanfaatan pekarangan masyarakat sebagai salah satu upaya pemenuhan pangan keluarga;
	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan kawasan perikanan	Konsumsi protein	Payung hukum dalam bentuk

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Penjelasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		tangkap, dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara. Sedangkan pengembangan perikanan budidaya, dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi.	perkapota per tahun yang bersumber dari ikan masih belum memenuhi standar B2SA; Penyediaan kawasan khusus perikanan membutuhkan proses dan dana yang besar;	RTRW; Tersedianya pelaku usaha perikanan; Tersedianya lahan yang masih memadai; Pemanfaatan pekarangan masyarakat sebagai salah satu upaya pemenuhan pangan keluarga;
	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bima keberadaanya memusat di pusat kota, tetapi ada indikasi berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota. Untuk pusat perbelanjaan berupa Pasar Raya Bima sebagai pasar grosir	Belum optimalnya pengumpulan data ketersediaan pangan terutama data ekspor dan impor.	Sebagai kota transit perdagangan dan jasa, ketersediaan pangan cukup tersedia. Fokus pelayanan distribusi kelompok pangan strategis dan menjaga keseimbangan harga pangan
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan wisata di Kota Bima salah satunya adalah Pengembangan kawasan wisata kuliner diarahkan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci.	Masih kurangnya promosi pangan lokal. Produksi pangan lokal yang masih sulit	Sumberdaya pangan lokal yang melimpah Dukungan Kawasan wisata sebagai tempat promosi produk pangan lokal
	Kawasan Peruntukan Perumahan	Rencana pengembangan perumahan di Kota Bima seluas 1.255 Ha diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan sekitarnya	Luasnya cakupan wilayah perumahan sehingga sasaran prioritas pengembangan program pangan lestari fokus di pemukiman pinggir kota Kurangnya dukungan SDM untuk pendampingan kegiatan dalam rangka	Dukungan dana dari pemerintah pusat terhadap Program Pangan Lestari, sebagai upaya pemenuhan konsumsi pangan keluarga.
		meliputi Kelurahan Merlayu, Tanjung,		

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Penjelasan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Paruga, Dara, Sarae, Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga, dan Kelurahan Sadia. Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan subpusat kota dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Jatiwangi, Jatibaru, Matakando, Rite, Penanae, dan Rabangodu Selatan. Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota meliputi kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo'o, Nitu, dan Kodo	optimalisasi program pangan lestari yang sasarannya pada halaman rumah masyarakat.	

Tabel 3.10.

Arahan Program dalam Perwujudan Ketahanan Pangan Kota Bima

Outcome	Para Pihak	Arah Program
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	1. Dinas Pertanian Kota Bima 2. Bappeda dan Litbang Kota Bima 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima	1. Peningkatan stok untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan bagi masyarakat; 2. Penyediaan pangan sehat dan bergizi; 3. Pemantauan stabilitas harga bahan pokok; 4. Diversifikasi pangan masyarakat;
Maningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Beragam	5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima	

3.4. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis ketahanan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang Ketahanan Pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

- 1) Neraca Bahan Makan Makann dan nilai PPH Ketersediaan belum memenuhi standar yang diarpakan;
- 2) Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Niai PPH Konsumsi) masih belum sesuai hirarki yang di tetapkan Beragam Bergizi dan Seimbang (B2SA).
- 3) Masih ditemukannya bahan pangan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, disebabkan karena sebagian besar bahan pangan yang beredar di Kota Bima berasal dari luar Kota Bima dan masih ada pengusaha yang belum menerapkan satandar mutu dan keamaann pangaan yang dipersyaratkan
- 4) Optimalisasi aktifitas mempercepat proses distribusi pangan dari produsen ke konsumen atau dari produsen ke konsumen dan akses pelaku usaha pangan lokal terhadap modal.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. **Tujuan** yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah ***Meningkatnya Ketahanan Pangan*** dengan Indikator Tujuan Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikaor yang mampu menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu Ketersediaa, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan Pemanfaatan pangan.

Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu penjabaran dari Misi Pertama dari Perubahan RPJMD 2018-2023 (Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing).

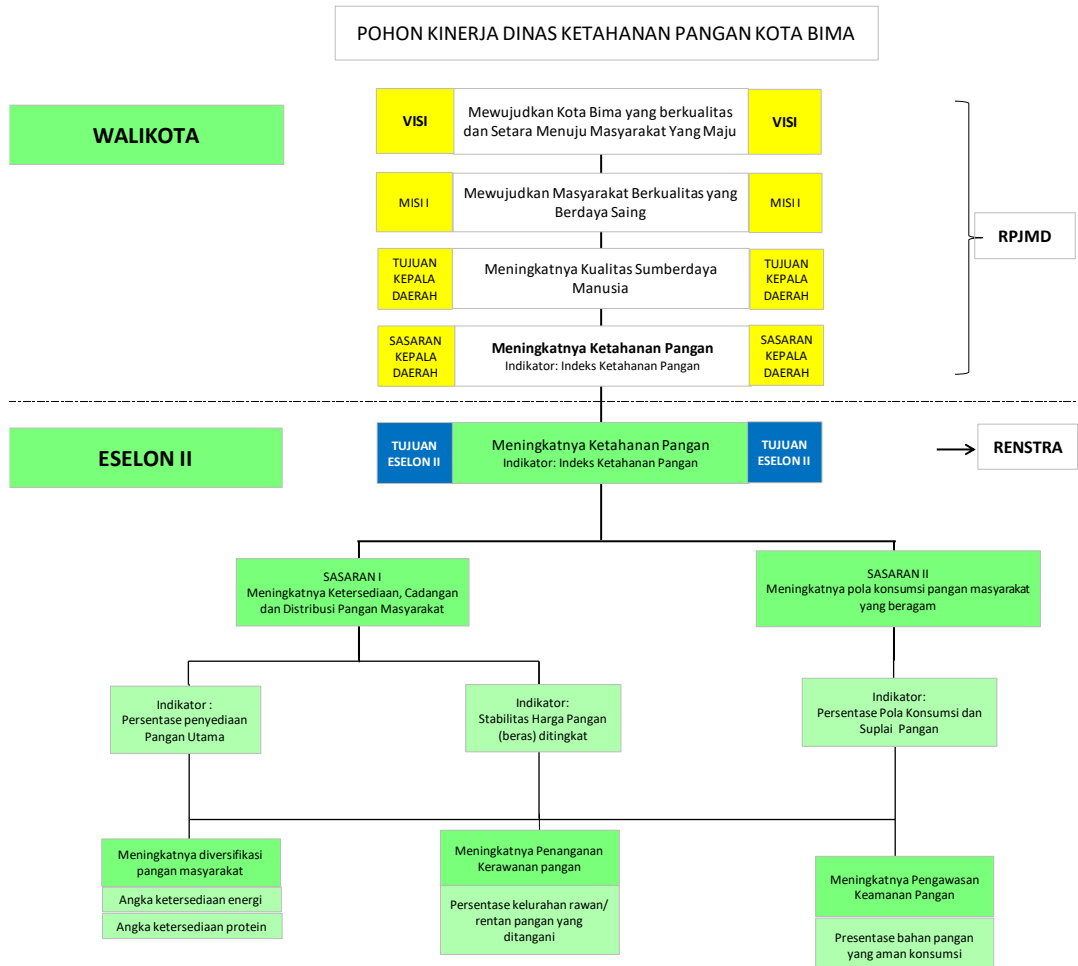
4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2018-2023. Untuk mendukung pencapaian tujuan (Meningkatnya Ketahanan Pangan) maka sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam.

Sebagaimana Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima beserta indikator kinerja dapat dilihat pada gambar pohon kinerja dan tabel yujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 berikut:

Gambar. 4.1.
Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima



Tabel 4.1.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase penyediaan Pangan Utama	%	18	20	22	24	25
			Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV $\leq$ 10%)	CV %	<10	<10	<10	<10	<10
		Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	%	84,5	85%	87	88,3	89,6

Sumber: RPJMD & Hasil analisis dan Casecading

4.2. Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Pada tabel dibawah ini (Tabel.4.2.) dapat dilihat Pencapaian kinerja indikator tujuan dan sasaran dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Berikut uraian singkat Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas ketahanan pangan Kota Bima.

4.2.1. Penjelasan Tujuan

- Tujuan : *Meningkatnya Ketahanan Pangan*
- Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan
- Definisi : Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). IKP tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi disusun oleh Badan Ketahanan Pangan.

Berikut tabel pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2019-2020:

Tabel. 4.2.

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2020, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Visi :		Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri																								
Misi :		Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing																								
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan Pada Tahun		Proyeksi Kinerja Tujuan Pada Tahun			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun		Proyeksi Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)			Capaian Kinerja Sasaran Pada Tahun	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	63	63,50	63,58	63,6	63,65	59,96	63,52	63,58	63,6	63,7	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase penyediaan Pangan Utama	%	18	20	22	24	25	21	22	22	24	25	140	110
													Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	CV %	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	100	100
												Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	%	84,5	85%	87	88,3	89,6	84,5	85,7	87	88,3	89,6	98	100,5

Ket:

IKP:

- Sumber data IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Jumlah Kota adalah 98
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kota dihitung dengan memperhitungkan IA dan IP. Sedangkan IK tidak dimasukkan dalam perhitungan IK
- Bobot IA = 0,45 dan IP= 0,55

Tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang merupakan dasar penyusunan indeks ketahanan pangan. Standarisasi dari tiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	-
Sub Total		-
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,2
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
Sub Total		0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Prevalensi balita stunting	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
Sub Total		0,55

Sumber: Dokumen IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100).
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:

- I : Indikator ke-1,2,3,...7,8 dan 9
J : Kabupaten ke-1,2,3,...414,415 dan kota ke-1,2,3,...96,97 dan 98
Y_j : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke-j
a_i : Bobot masing-masing Indikator ke-i
X_{ij} : Nilai Standarisasi masing-masing indikator pada Kabupaten/Kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Wilayah yang dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan cut off poin IKP, pada kelompok 1 adalah kelompok Kabupaten/ Kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/ kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 4.4.
Cut off point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	$\leq 41,52 - 51,42$	$\leq 28,84 - 41,44$
3	$\leq 11,42 - 59,58$	$\leq 41,44 - 51,29$
4	$\leq 59,58 - 67,75$	$\leq 51,29 - 61,13$
5	$\leq 67,75 - 75,68$	$\leq 61,13 - 70,64$
6	$> 75,68$	$> 70,64$

Sumber Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota yang, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota berdasarkan yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan 1-3 diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya angka balita stunting, iii) tingginya penduduk miskin.

Sementara kota-kota di kelompok 1-3 diindikasikan oleh: i) tingginya pengeluaran pangan $>65\%$ terhadap total pengeluaran, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya angka balita stunting.

Nilai IKP Kota Bima tahun 2019-2020 mengalami kenaikan 0,52 poin, dan Cut Off Poin Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima masuk dalam kelompok 5 atau pada prioritas 5. Dapat dikatakan Kota Bima jika dilihat dari angka IKP nya masuk dalam kategori BAIK artinya termasuk dalam kelompok kota yang memiliki ketahanan pangan baik pada tahun tersebut. Dibandingkan dengan nilai IKP provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 62.43 atau masih lebih besar IKP Kota Bima sebesar 1,09 poin.

Sumber data:

Dari tabel 4.3 diatas dapat dikatakan pengampuh untuk mencapai nilai IKP yang BAIK adalah

- Data informasi Kemiskinan, BPS
- Dinas Kesehatan
- Bulog
- Dinas Pertanian dan Peternakan
- Dinas Kelautan dan Perikanan

Intervensi Kebijakan

Intervensi kebijakan yang dapat dilakukan terhadap hasil perhitungan nilai IKP. Identifikasi terhadap indikator utama pada wilayah rentan terhadap kewarisan pangan di suatu wilayah akan memudahkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkan intervensi program yang akan dilaksanakan serta target kelompok masyarakat/lokasi pelaksanaan program. Ketepatan dalam pelaksanaan intervensi program berdampak positif terhadap efisiensi dalam penggunaan sumberdaya (manusia dan alam), anggaran, serta waktu yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan. Alternatif intervensi dapat dilakukan di wilayah kota adalah sebagai berikut (tabel 4.5)

Tabel. 4.5.
Alternatif Intervensi di Wilayah Kota

Indikator	Penyebab	Intervensi
Proporsi pengeluaran pangan	• Terbatasnya akses pangan rumah tangga • Fluktuasi harga pangan strategis • Tingkat pendapatan petani	• Pendekatan sumber pangan rumah tangga • Pengendalian harga pangan • Peningkatan pendapatan rumah tangga
Akses terhadap air bersih	• Rendahnya infrastruktur air bersih • Rendahnya sanitasi lingkungan	• Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih • Sosialisasi dan penyuluhan
Prevenlensi Stunting	• Rendahnya akses terhadap air bersih • Pola asuh	• Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih • Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak

4.2.2. Penjelasan Sasaran

Pelaksanakan fungsi Ketahanan pangan yang di dapat disebutkan terbentuk oleh tiga pilar ketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas dan Pemanfaatan pangan yang aman. Dan di telah disebutkan sebelumnya pada sub bagian Indeks Ketahanan Pangan diatas, bahwa Indeks Ketahanan Pangan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penetapan sasaran dan indikator sasaran dinas Ketahanan Pangan kota Bima pada Sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) dapat mewakili dalam mendukung pencapaian tujuan dan indikator tujuan.

4.2.2.1. Sasaran 1, Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan.

Definisi : Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Indikator : 1. Persentase penyediaan Pangan Utama
2. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen ($CV \leq 10\%$)

A. Indikator sasaran 1 (satu) adalah:

1). Persentase penyediaan Pangan Utama, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{Ketersediaan pangan utama tahun N (Kg)}}{\Sigma \text{Kebutuhan pangan}} \times 100$$

2). Pengertian

- a. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri/atau sumber lain.
- b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, keragaman dan keamanannya.
- c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasok pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Data ketersediaan pangan utama diambil dari data:

1. Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan milik dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Gudang Cadangan Pangan Kota Bima yang berlokasi di jalan gajah mada nomor 92 atau tepatnya berada di belakang kantor Dinas Ketahanan pangan Kota Bima.

2. Cadangan Pangan Masyarakat

Cadangan Pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga, termasuk, petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

3. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

- LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), jumlah ketersediaan pangan (beras) di LDPM
- Penggilingan/pengusaha, ketersediaan pangan (beras) di penggilingan yang berada di Kota Bima

4. Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima (GBB.Jatiwangi) yang menjadi peruntukan Kota Bima.

3. Definisi Operasional

a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah:

- Tersedianya cadangan pangan pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota minimal 100 ton ekuivalen beras dan ditingkat provinsi sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat:

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras ditingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala local dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan luar.

c. Cara Perhitungan/ Rumus:

- Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai capaian Bidang Kab/Kota} = \frac{\sum \text{Cad. Kab/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kecamatan yang mempunyai cad.pangan masy} = \frac{\sum \text{kecamatan yang memp. Cad.pangan}}{\sum \text{kecamatan}} \times 100\%$$

$$\text{a. Cad. Pangan masing}^2 \text{ desa} = \frac{\sum \text{Cad. Pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100\%$$

$$\text{b. Cad. Pangan per kecamatan} = \frac{(\sum \text{Cad. Pangan I})}{500 \text{ kg}} + \frac{\sum \text{Cad. Pangan ..}}{500 \text{ kg}} + \frac{\sum \text{Cad. Pangan (n)}}{500 \text{ kg}} \times 100\%$$

d. Kebutuhan pangan:

Kebutuhan pangan adalah jumlah konsumsi per kapita per tahun yang menjadi standar Provinsi NTB adalah 120 kg di kalikan dengan jumlah penduduk Kota Bima Tahun N. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Pangan Utama Kota Bima} = \text{Konsumsi Per Kapita Pertahun} \times \sum \text{Penduduk}$$

B. Indikator Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen ($CV \leq 10\%$)

a. Pengertian:

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

b. Definisi Operasional:

- Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%).
- Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan Pokok Strategis menggambarkan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

c. Cara Perhitungan/Rumus

Formula dalam perhitungan indikator Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat konsumen sebagai berikut:

$$CV = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$$

Std. Deviasi Harga Pangan adalah nilai statistik harga pangan yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data harga pangan dari suatu sampel statistik harga pangan dengan data mean atau rata-rata harga pangan. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan, adalah nilai rata harga pangan pada tahun berjalan.

d. Sumber Data;

Data/ Informasi harga dari pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan (pasar, distributor), BPS, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

4.2.2.2. Sasaran 2, Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam

Sasaran 2 : Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam.

Pengertian : Menggambarkan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang menjadi salah satu entry poin sub system untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu di produksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau panganyang tersedia.

Indikator : Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Indikator Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1. Pengertian

- a. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- b. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah, upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraanekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencukupi jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- b. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan;
- c. Cara Perhitungan Rumus
 - Nilai capaian peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya Skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.
 - Rumus:

$$\text{Nilai capaian peningkatan} = \% \text{ AKG} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$$

Skor PPH

$$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas} \times 100\%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$$

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

1. Penjelasan:

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum.
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

2. Contoh PPH yang dicapai pada tahun 2020

Tabel.4.6. Skor PPH yang dicapai pada tahun 2020

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKG*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKG	Skor Maks	Skor PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Padi-padian	365,0	1.490	64,3	69,3	0,5	32,1	34,7	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	11,0	12	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	2,5	0,3
3.	Pangan Hewani	154,4	267	11,5	12,4	2,0	23,1	24,9	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	29,5	265	11,4	12,3	0,5	5,7	6,2	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	5,1	28	1,2	1,3	0,5	0,6	0,7	1,0	0,7
6.	Kacang-kacangan	17,6	43	1,8	2,0	2,0	3,7	4,0	10,0	4,0
7.	Gula	15,2	58	2,5	2,7	0,5	1,3	1,4	2,5	1,4
8.	Sayur dan Buah	263,5	111	4,8	5,1	5,0	23,9	25,7	30,0	25,7
9.	Lain-lain	144,4	44	1,9	2,0	-	-	-	-	-
	Total		2.318,4	100,0	107,8		90,6	97,7	100,0	86,0

3. Sumber Data

- a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan tahun tertentu (bias bersipat t atau t-1).
- b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik
Untuk perhitungan PPH konsumsi Kota Bima menggunakan data sekunder.

Jadi Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan adalah, susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Skor maksimal adalah 100. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui perhitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. AKG yang digunakan merupakan asupan rata-rata yang dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi perorangan/individu. Di Indonesia, AKG dirumuskan dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015-2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram.

Penilaian terhadap **Konsumsi Pangan Penduduk** secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), **Konsumsi Energi Penduduk** (gram/kap/hari).

1. Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun) dihitung dengan menjumlahkan bahan pangan per jenis komoditas, baik bentuk asal maupun olahannya untuk bahan pangan olahan, sebelum dijumlahkan, terlebih dahulu dikonversikan ke bentuk asalnya menggunakan angka konversi yang telah ditetapkan.
2. Total Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energi setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energi setiap jenis pangan tersebut.
3. Total Konsumsi Protein Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi protein penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi protein setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi protein masing-masing jenis pangan diperoleh dari

perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan protein setiap jenis pangan tersebut.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 5.1.berikut.

5.1. Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran strategi pada RPJMD tahun 2018-2023, serta kondisi umum saat ini, maka Strategi Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai berikut:

Tabel. 5.1.

(Tabel C.26 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023

Visi :		Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri		
Misi 1 :		Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan
Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	Peningkatan kersediaan pangan utama	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein dengan pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk (volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi).
	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	Menjaga stabilitas harga pangan ditingkat konsumen	Meningkatkan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, dengan pasokan pangan merata, dan terjangkau secara berkelanjutan.
			Peningkatan Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam Bergizi dan Seimbang	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dengan rumah tangga mampu mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai

Visi :	Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri			
Misi 1 :	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan
				kaidah gizi dan kesehatan.

Tabel 5.1. dan 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 menunjukkan relevansi dan konsistensi Visi, Misi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

5.2. Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel. 5.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2019-2023

Visi :	Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri						
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	Peningkatan kersediaan pangan utama				
			Menjaga stabilitas harga pangan ditingkat konsumen				
			Peningkan Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam Bergizi dan Seimbang				
	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam					

Sumber: Hasil analisis dan Casecadang

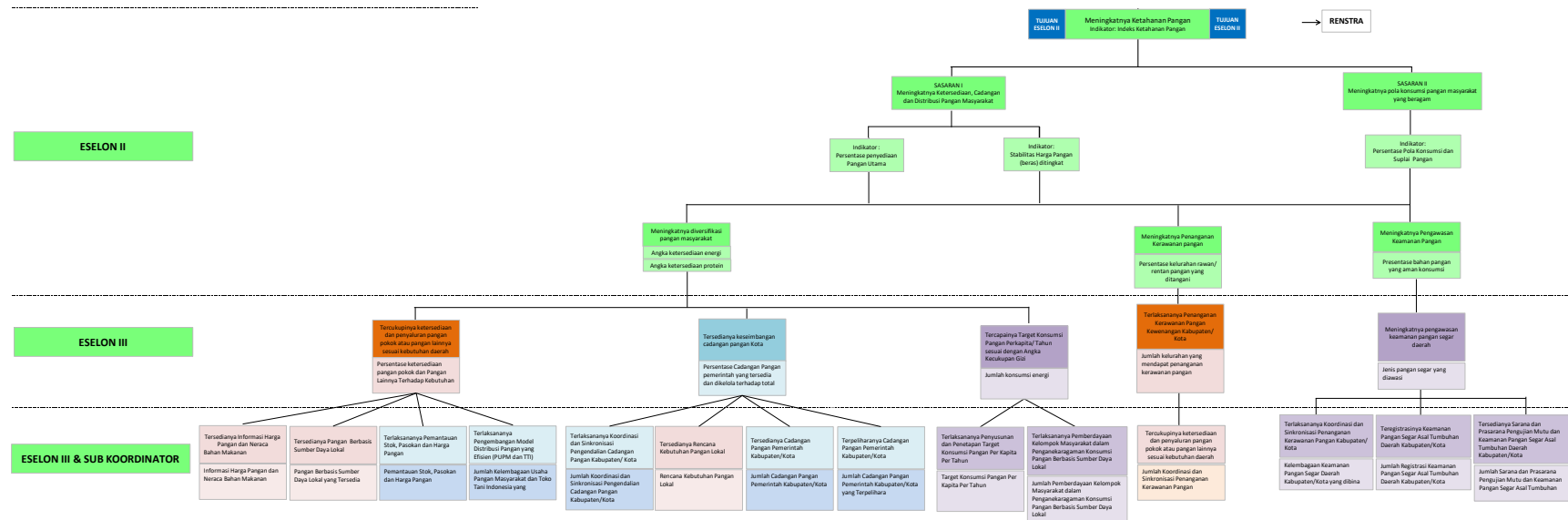
Tabel. 5.3.

Keterkaitan sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri						
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Bidang Penanggungjawab
Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	1. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan 2. Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	1. Peningkatan ketersediaan pangan 2. Memudahkan aksesibilitas produk pangan strategis 3. Memudahkan aksesibilitas produk pangan strategis 4. Peningkatan Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam Bergizi dan Seimbang	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan Kabid Distribusi dan Harga Pangan
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kabid. Distribusi dan Harga Pangan
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
				Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sumber: Hasil analisis dan Casecading

Gambar.5.1. Pohon Kinerja/ Croscuting Pelayanan Ketahanan Pangan



BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023 terdiri dari rencana program kegiatan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terdiri atas 3 (Tiga) Program Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan 1 (Satu) Program Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023 sebelum Perubahan yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) program Urusan Wajib Bukan pelayanan Dasar dan 5 (lima) Program Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

6.1. Rencana Program

Dalam pelaksanaan program periode 2019-2020 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), dilaksanakan melalui Program (tertuang pada tabel.6.1):

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- b. Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan
- c. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; dan lima program pendukung:
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam pelaksanaan program periode 2021-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), dilaksanakan melalui Program (tertuang pada tabel.6.2):

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan dan
- d. Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci kerangka pendanaan dan program perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu dasar penyusunan RENSTRA dan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai salah satu dasar perubahan RENSTRA OPD, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1.

(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikato r Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi			
													2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
													Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)	
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
AKIP OPD	Meningka tnya Akuntabil itas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP DISHAN PAN	2	3	2	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentas e Capaian pelayanan administra si perkantor an	%	100%	100 %	571.966	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	Org		48	150.900	48	165.990	48	182.589	48	200.847	48	220.932	240	220.932	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikas i, sumberda ya air dan listrik	Bulan		12	30.600	12	33.660	12	36.720	12	39.780	12	42.840	60	45.900	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemelihar aan dan perijinan kendaraan yang terlayani	Unit/ bulan		12	13.767	12	13.767	12	15.144	12	15.281	12	16.672	60	16.949	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Pengelola Administra si Keuangan	Orang / Bulan		60	46.488	60	51.137	60	55.786	60	60.434	60	65.083	300	69.732	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	0 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	Jumlah jenis peralatan pembersih	Jenis				16	5.000	16	10.000	16	12.000	16	13.000	64	14.000	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	0 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	Unit				10	8.000	10	8.000	10	10.000	10	15.000	40	20.000	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		120	26.554	120	29.554	120	32.554	120	35.554	120	38.554	600	41.554	Dishan pan	Kota Bima

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikator r Sasaran	Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi			
														2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
														Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)	
			2	3	2	3	1	1	1	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandaka n	Jenis		120	41.000	120	45.100	120	49.200	120	53.300	120	57.400	600	61.500	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengka pan Kantor	Unit		5	8.500	5	12.600	3	16.700	3	20.800	3	24.900	19	29.000	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan kerjasama Dengan Media	Media/ bulan		240	108.460	60	112.560	60	116.660	60	120.760	60	124.860	480	128.960	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pelayanan makanan dan minuman	Orang/ tahun		528	25.834	500		500	29.934	500		500		252 8		Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	1	1	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali		35	128.362	20		20	132.462	20		20		115		Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentas e ketersedia an sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	2	9		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan pengadaa n peralatan kantor	Paket		4	118.556	4	122.656	3	122.656	3	126.756	3	130.856	17	134.956	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	2	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai	Unit		1	17.000	1	21.100	1	21.100	1	25.200	1	29.300	5	33.400	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	2	2	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang	Kali		4	21.000	4	25.100	4	25.100	4	29.200	4	33.300	20	37.400	Dishan pan	Kota Bima

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikato r Sasaran	Kode								Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi			
															2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
															Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)	
											dipelihara																		
			2	3	2	3	1	2	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan peralatan gedung kantor	Unit		10	12.650	10	16.750	10	16.750	10	20.850	10	24.950	50	29.050	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	2	4	2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Kali		0		0		1	4.100	1		1		3		Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparat	%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	3	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah berpakaian seragam yang dibagikan	Stel		40	24.000	0	28.100	0	28.100	55	32.200	55	36.300	150	40.400	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan sumberdaya pegawai	%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	5	2		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Orang		40	26.650	55	30.750					4.100	95	8.200	Dishan pan	Kota Bima		
			2	3	2	3	1	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	6	1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD	Dokumen		1	105.500	3	109.600	3		3		3		13	4.100	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	6	2		Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD	Dokumen		1	3.750	1	7.850	1		1		1		1		5	4.100	Dishan pan

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikato r Sasaran	Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi		
														2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
														Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)
			2	3	2	3	1	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokum en		1	6.250	1	10.350	1		1		1		5	4.100	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	6	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/ DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana an dan pengangga ran SKPD	Dokum en		4	23.000	5	27.100	5		5		5		24	4.100	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	6	6	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP dan LPPD	Dokum en		2	12.500	2	16.600	2		2		2		10	4.100	Dishan pan	Kota Bima
Meningka t Ketahana n Pangan	Indeks Ketahana n Pangan	Persent ase penyedi aan Pangan Utama Stabilita s Harga Pangan (beras) ditingka t konsum en (CV ≤ 10%)	2	3	2	3	1	7		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka Ketersedia an Energi	kkal/ kap/ hari	2.572	2.57 2		2.60 2		2.63 2		2.66 2		2.69 2		2.69 2			
											Angka ketersedia an protein	gram/ kap/ hari	56	65,6 8		66,1 8		66,6 8		67,1 8		67,6 8		67,6 8		Dishan pan	Kota Bima
											Penguatan Cadangan Pangan	Ton	5,45	10													
												Jumlah konsumsi energi kkal/ kap/ hari	kkal/ kap/ hari	2.196	2.19 6												
												Persentas e mutu keamanan pangan		80%	82%												
			2	3	2	3	1	7	5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan yang disusun (Dokumen NBM dan PPH ketersedia an)	Dokum en	2	2	85.400	2	87.400	2	89.400	2	91.400	2	93.400	10	93.400	Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	7	3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis PPH	Dokum en	1	1	19.325									1		Dishan pan	Kota Bima
2	3	2	3	1	7	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaa tkan	Kelomp ok	20	25	109.975									25		Dishan pan	Kota Bima			

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikator r Sasaran	Kode								Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi		
															2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
															Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)
											pekarangan untuk pengembangan pangan																	
			2	3	2	3	1	7	1 1	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Komoditi terdata Harganya	Komoditi	17	17	25.600									17		Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	1 3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	5	10	221.500									10		Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	1 4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan fasilitas kemandirian pangan	Kelurahan	10	10	73.875	10	90.000	10	100.000	10	120.000	10	120.000	50		Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	1 6	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Terwujudnya Diversifikasi Tanaman		2 Paket	2 Paket	123.600.000	2 Paket	123.600.000	2 Paket	123.600.000	2 Paket	123.600.000	2 Paket	123.600.000	2 Paket	123.600.000	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	1 6	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Jumlah kelompok binaan pengembangan sumber daya pangan	Kelurahan	5	7	123.600	8	123.600	8	123.600	8	123.600	8	123.600	39	123.600	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	2 2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang mutu dan keamanan pangan (kelompok)	kelompok	2	3	76.900											Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	7	3 3	Pelaksanaan Sitem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	1	1	63.375	1	63.375	1	63.375	1	63.375	1	63.375	1	63.375	Dishan pan	Kota Bima	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikato r Sasaran	Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi		
														2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
														Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)
			2	3	2	3	1	7	34	Pembinaan produk pangan berbahan baku lokal	Jumlah Kelompok masyarakat/ pengusaha pangan olahan yang terbina	kelomp ok			10	85.000	10	93.500	10	102.850	10	113.135	40	124.449			
			2	3	2	3	1	7	36	Pembinaan dan Monitoring Ketersediaan Pangan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan monev	Kali			2	60.000	2	66.000	2	72.600	2	79.860	8	87.846			
			2	3	2	3	1	7	30	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Masyaraka t yang mendapat penyuluha n sumber pangan alternatif	Kecama tan	5	5	21.000								5			Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	7	32	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah kelurahan peserta lomba	Kelurah an	38	41	141.907								41			Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	09		Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan	Persentas e peningkat an Cadangan Pangan	%	5%			5%		5%		5%		5%			Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	09	01	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Data Komoditi per bulan (komoditi 17 Komoditi per bulan)	Komodi ti	17		17	30.000	17	35.000	17	40.000	17	45.000	68	45.000	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	09	02	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	13		13	279.000	14	306.900	16	337.590	18	371.349	61	408.484	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	09	03	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan desa	Unit	4		4	50.000	4	55.000	4	60.500	4	66.550	16	66.550	Dishan pan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	09	04	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang terfasilitasi	LDPM	4		4	50.000	4	55.000	4	60.500	4	66.550	16	36.750	Dishan pan	Kota Bima	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikato r Sasaran	Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi		
														2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
														Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)
		Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	2	3	2	3	1	10		Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah konsumsi energi / Kkal	kka/kap/hari	2.367,4	2.367,4		2.327,8		2.308		2.288		2.269		2.269		Dishanpan	Kota Bima
										Persentase mutu keamanan pangan	%	79	80		85		85		88		88		88		Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis PPH	Dokumen	1		1	30.000	1	33.000	1	36.300	1	39.930	4	35.325	Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	02	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kelompok	10		10	124.975	10	137.473	10	151.220	10	166.342	40	144.975	Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	03	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang mutu dan keamanan pangan (kelompok)	Kelompok	2		2	76.900	2	84.590	2	93.049	2	102.354	8	102.354	Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	04	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Masyarakat yang mendapat penyuluhan sumber pangan alternatif	Kecamatan	5		5	50.000	5	55.000	5	60.500	5	66.550	20	66.550	Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	05	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba (41 kelurahan)	Kelurahan	38		0	141.907	41	156.098	41	171.707	41	188.878	123	188.878	Dishanpan	Kota Bima	
			2	3	2	3	1	10	06	Penyelenggaraan Promosi Produk Pangan Lokal	Jumlah pelaksanaan promosi	Kali	2		2	120.000	2	132.000	2	145.200	2	159.720	8	159.720	Dishanpan	Prov. Dan Nasional	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Indikator r Sasaran	Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah	lokasi			
														2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
														Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)			Targ et	Rp (000)	
			2	3	2	3	1	8		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentas e peningkat an pemasara n hasil produksi	%	100	100 %													Dishan pan	Kota Bima
			2	3	2	3	1	8	7	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perk ebunan Unggulan Daerah	Jumlah pelaksana an promosi	Kali		2	80.800.0 00	1								3		Dishan pan	Prov. Dan Nasio nal	

Tabel 6.2.

(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

N O	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
1	Menin gkatny a ketaha nan panga n	Inde ks Keta hana n Pang an	Menin gkatny a Keters ediaan , Cadang an dan Distrib usi Panga n Masya rakat	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningka tnya diversifik asi pangan masyarak at	Jumlah keterse diaan energi	kka/ kap/ hari	2.632					2.63 2	1.31 9.55 0	2.66 2	1.451. 505	2.69 2	1.596. 656	2.6 92	1.756. 321		
							Jumlah keterse diaan protein	gra m/ kap/ hari	66,68					66,6 8		67,1 8		67,6 8		67, 68			
			Menin gkatny a pola konsum si panga n masya rakat yang keraga man	2.09.03. 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tercukupi nya ketersedi aan dan penyalur an pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuha n daerah	Persent ase keterse diaan pangan pokok terhada p kebutu han daerah	%	20					20	130. 800	20	143.8 80	20	158.26 8	20	174.09 5		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.03. 2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusun nya Dokumen IHP dan NBM	Jumlah dokumen IHP dan NBM	Dokumen	2					2 Dokumen	30.000	2	33.000	2	36.300	2	39.930	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.03. 2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya penyediaan dan pembinaan produk pangan olahan	Jumlah Kelompok masyarakat/ pengusaha pangan olahan yang terbina	Kelompok	10					10 Kelompok	50.000	10	55.000	10	60.500	10	66.550	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.03. 2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Tersedianya data harga pangan pokok	Data Komoditi per bulan (komoditi) (17 Komoditi per bulan)	komoditi	17					17 komoditi	25.800	17	28.380	17	31.218	17	34.340	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.03. 2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien (PUPM dan TTI)	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang terfasilitasi	LDP M dan PUP M	4 LDPM, 1 PUPM					4 LDPM, 1 PUP M	25.000	4 LDPM, 1 PUP M	27.500	4 LDPM, 1 PUP M	30.250	4 LDPM, 1 PUP M	33.275	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.03. 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia dan dikelola terhadap total kebutuhan daerah	%	16%					16%	338.750	18%	372.625	20%	409.888	22%	450.876		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kali	2					2	28.750	2	31.625	2	34.788	2	38.266	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	dokumen	1					1	20.000	1	22.000	1	24.200	1	26.620	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.03.2.02.01	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Daerah)	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	13					15	250.000	17	275.000	18	302.500	20	332.750		Kota Bima
				2.09.03.2.02.02	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan yang terpelihara	Ton	13					15	40.000	17	44.000	18	48.400	20	53.240	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.03. 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupa n Gizi	Jumlah konsum si energi	kka/ kap/ hari	2,161, 5					2,16 1,5	850. 000	2.28 8,00 0	935.0 00	2.26 9,00 0	1.028. 500	2.2 69 kka/ ka p/ ha ri	1.131. 350		
				2.09.03. 2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis PPH	dokumen	1					1	650. 000	1	715.0 00	1	786.50 0	5	865.15 0	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
						Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan	Kelompok	10					8		8		8		34			

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiatan n dan Sub Kegiatan	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.03. 2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya lomba B2SA dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba B2SA Tingkat Kota Bima	Kelu raha n	41					41	200.000	41	220.000	41	242.000	41	266.200	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a, Pro vins i
						Jumlah pelaksanaan promosi	Kali	2					2	2		2		2	10		Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a, Pro vins i	
						Jumlah pelaksanaan sosialisasi B2SA disekolah	Kali	2					2	2		2		2	10		Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a	
				2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase kelurahan rawan/rentan pangan yang ditangani	%	20					20	20.000	20	22.000	20	24.200	100%			

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	Kelurahan	10					5	20.000	5	22.000	5	24.200	25	26.620		
				2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Keg	2					2	20.000	2	22.000	2	24.200	2	26.620	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	%	80					85	113.300	88	124.630	90	137.093	95	150.802		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.05. 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Meningka tnya pengawa san keamana n pangan segar daerah	Jenis pangan segar yang diawasi	%	80				80	113. 300	80	124.6 30	80	137.09 3	80	150.80 2			
				2.09.05. 2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksan anya penguata n kelembag aan keamana n pangan segar daerah Kota	Jumlah kelompo k masyarak at yang memper oleh pemaha man tentang mutu dan keamana n pangan (kelompo k)	Kelo mpo k	11				11	10.3 00	11	11.33 0	11	12.463	11	13.709	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a	
				2.09.05. 2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksan anya registrasi keamana n pangan segar asal tumbuha n Kota	Jumlah petani/ pelaku usaha yang di Registrasi Keamana n Pangan segar Asal Tumbuha n	peta ni/ pela ku usah a	25				25	48.0 00	25	52.80 0	25	58.080	25	63.888	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a	

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.05. 2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah alat uji pangan	Jumlah alat uji pangan	Unit	1						55.000	1	60.500	1	66.550	1	73.205	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100				100		3.451.766	100	3.796.943	100	4.176.637	100	4.594.301		
				2.09.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100				100		6.000	100	6.600	100	7.260	100	7.986		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	dokumen	2					2	2.000	2	2.200	2	2.420	8	2.662	Dinas Kethanangan Pangan	Kotabima
				2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	dokumen	1						500	1	550	1	605	3	666	Dinas Kethanangan Pangan	Kotabima
				2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P	dokumen	1						500	1	550	1	605	3	666	Dinas Kethanangan Pangan	Kotabima
				2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1						500	1	550	1	605	3	666	Dinas Kethanangan Pangan	Kotabima

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1					500	1	550	1	605	3	666	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima	
				2.09.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	dokumen	2					2.000	2	2.200	2	2.420	6	2.662	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima	
				2.09.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100				100	2.914.266	100	3.205.693	100	3.526.262	100	3.878.888	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima	

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi				
										2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)
										Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)								
				2.09.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Orang	39					39	2.862.766	39	3.149.043	39	3.463.947	39	3.810.342	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima				
				2.09.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase kesesuaian praktek penatausahaan keuangan SKPD dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan (%).	%	100					100	48.000	100	52.800	100	58.080	100	63.888	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima				

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksan anya Koordina si dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuang an akhir tahun	Lapo ran/ Dok ume n	1						2.50 0	1	2.750	1	3.025	1	3.328	Dina s Keta hana n Pang an	Kota Bima
				2.09.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Terlaksan anya Koordina si dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD	Jumlah laporan keuang an semest eran	Sem ester	2						1.00 0	2	1.100	2	1.210	2	1.331	Dina s Keta hana n Pang an	Kota Bima
				2.09.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksan anya Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	Persenta se pelaksan aan kegiatan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	%	100					100	500	100	550	100	605	100	666		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1					1	500	1	550	1	605	1	666	Dinas Ketan Pangan	Kota Bima
				2.09.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%	100					100	30.000	100	33.000	100	36.300	100	39.930		
				2.09.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	30					30	25.000	30	27.500	30	30.250	30	33.275	Dinas Ketan Pangan	Kota Bima

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksan anya Sosialisasi Peratura n Perundan g- Undanga n	Jumlah PNS yang mengik uti sosialisasi Peratur an Perund ang- Undang an	PNS	30					30	5.00 0	30	5.500	30	6.050	30	6.655	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a
				2.09.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningka tnya Adminis trasi Umum Perangka t Daerah	Persent ase pelaksa naan kegiata n adminis trasi Umum Perangk at Daerah	%	100					100	343. 000	100	377.3 00	100	415.03 0	10 0	456.53 3		
				2.09.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Terlaksan anya Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Kompo nen Instalasi Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor	jenis	3					3	2.00 0	3	2.200	3	2.420	3	2.662	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	3					3	30.000	5	33.000	5	36.300	5	39.930	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan makanan dan minuman	orang/ kali	250					250	25.000	250	27.500	250	30.250	250	33.275	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	8					8	30.000	8	33.000	8	36.300	8	39.930	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima
				2.09.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan kerjasama Dengan Media	Media	5					5	6.000	5	6.600	5	7.260	5	7.986	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Bima

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngkat Daerah	lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				2.09.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	10					10	250.000	25	275.000	25	302.500	25	332.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Bima
				2.09.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100					100	85.000	100	93.500	100	102.850	100	113.135		
				2.09.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Surat	500					500	50.000	500	55.000	500	60.500	500	66.550	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Bima

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komuni kasi, sumber daya air, listrik dan kebersi han kantor	Jasa/ bula n	4					4	30.0 00	4	33.00 0	4	36.300	4	39.930	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a
				2.09.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jenis peralat an dan perleng kapan kantor	jenis	22					22	5.00 0	22	5.500	22	6.050	22	6.655	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a
				2.09.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningka tnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persenta se pelaksan aan kegiatan Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	%	100					100	73.0 00	100 %	80.30 0	100 %	88.330	10 0%	97.163		

N O .	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiatan dan sub Kegiatan n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan n	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksan anya Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Kendar aan Dinas Jabatan	Unit	1					1	20.0 00	1	22.00 0	1	24.200	1	26.620	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a
				2.09.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Jumlah Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Unit	10					10	3.00 0	10	3.300	10	3.630	10	3.993	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a

N O .	Tujuan OPD	Indik ator Tuju an	Sasara n (Sasar an Strateg is OPD)	Kode Rek Progra m, Kegiata n dan sub Kegiata n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikato r Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Data Capai an pada tahun awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah	lok asi
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Tar get	Rp (0 00)	Tar get	Rp (0 00)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
				2.09.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksan anya Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terpelih ara	Jenis	3				3	25.0 00	3	27.50 0	3	30.250	3	33.275	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a	
				2.09.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksan anya Pemeliha raan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Cakupa n gedung kantor yang direhab / dipeliha ra	%	50				50	25.0 00	50	27.50 0	50	30.250	50	33.275	Dina s Keta hana n Pang an	Kot a Bim a	

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai:

Tabel 7.1.

(Tabel T-C.6 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penyediaan Pangan Utama	10%	18 %	20 %	22 %	24 %	25 %	25 %
2.	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
3.	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	84	84,5	85	87,0	88,3	89,6	89,6

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kota Bima adalah Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis ini beberapa tujuan dalam SDGs telah diakomodir oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima baik secara langsung sebagai target perangkat daerah dan secara tidak langsung berhubungan dengan pencapaian target SDGs melalui target hasil capaian program maupun target keluaran capaian kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2. berikut.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target SDGs

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tujuan 2. Tanpa Kelaparan (zero hunger- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) Target 2.1. Pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan jaminan akses bagi semua orang. Khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun								
1.1	Indikator 2.1.1.1.Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). (Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)								
	Indikator A.2.UWD.2.15 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/ (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)								
	Jumlah konsumsi energi kkal/ kap/ hari	kkal/ kap/ hari	2.196	2.367,4	2.327,8	2.308,1	2.288,3	2.268,6	2.268,6
	Indikator 2.1.1.(a.1.) Angka Ketersediaan Energi (Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima)								
	Ketersediaan Energi	kkal/ kap/ hari	2.572	2.572	2.602	2.632	2.662	2.692	2.692
1.2	Indikator 2.1.2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)								
	Indikator A.1.AKM.30 Penanganan daerah rawan pangan (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)								
	Persentase Penyediaan Pangan Utama	%	15%	18%	20%	22%	24%	25%	25%
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat Konsumsi	SD %	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
1.3	Indikator. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari (Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)								
	Indikator A.2.UWD.2.15. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)								
	Ketersediaan Energi	kkal/ kap/ hari	2.572	2.572	2.602	2.632	2.662	2.692	2.692
	Angka ketersediaan protein	kkal/ kap/ hari	56	65,68	66,18	66,68	67,18	67,68	67,68
1.4	Indikator. 2.1.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)								
	Indikator A.2.UP.8.2 Konsumsi Ikan (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)								
	Persentase PPH Konsumsi	%	85,3	84,5	85	87	88,3	89,6	89,6

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023. Revisi Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat dalam menjadim kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis ini kepada seluruh pegawai, mitra, dan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Kota Bima,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ir. Syamsudin
Pembina Utama TK. I. VI/C
NIP. 19620103 199203 1 006



PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 92 Kel. Penatoi Kec. Mpunda, email : dkpkotabima17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

NOMOR : 521/089 /DISHANPAN/ VII /2021

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
TAHUN 2018-2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2018-2023, setiap OPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang efektif, efisien berfokus, dan berkelanjutan tentang pembangunan ketahanan pangan tahun 2018-2023 secara sistematis dan selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2018-2023, perlu disusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Kota Bima Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021-2023;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,

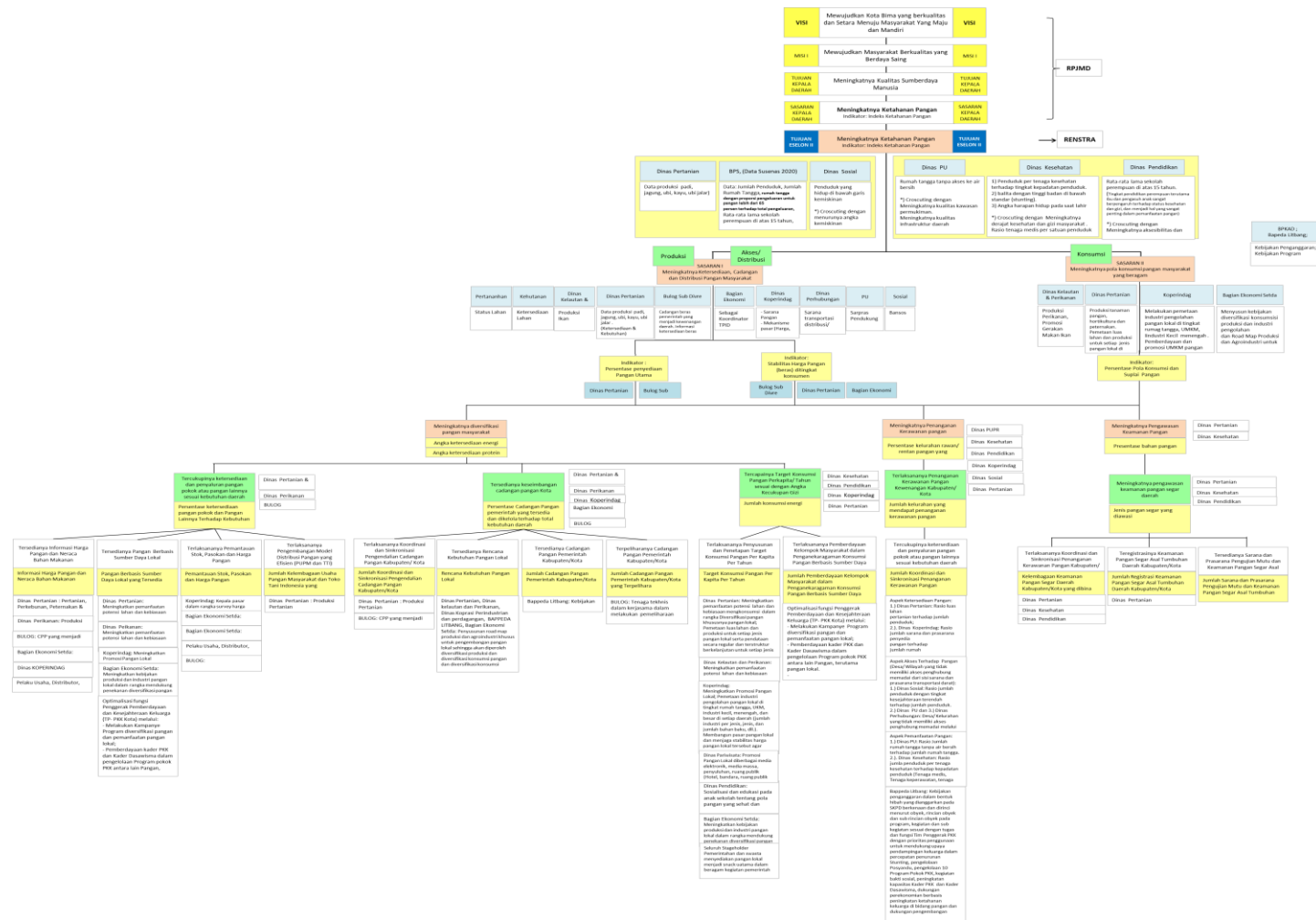
Ditetapkan di Raba - Bima
Pada tanggal, 2021


Ir. Syamsudin
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19620103 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bima di Raba;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima di Raba;
3. Yang bersangkutan masing-masing untuk maklum.

Croscuting Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima



Casecading Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	SASARAN OPD	IKU OPD	Satuan	Target PD Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Satuan	Target Kinerja Program					Realisasi					KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
							2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020						2021	2022	2023													
							2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022						2023															
Program Kegiatan Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodeifikasi																																									
1	Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat Berketahanan yang Berdaya Saing	Meminimalisir ketahanan pangan	Indikator Ketahanan Pangan	Meminimalisir Ketahanan Pangan	Persepsi Ketahanan Pangan	%	18	20	22	24	25	10	22	56%	110%	PROGR	Meminimalisir Ketahanan Pangan	Angka ketahanan energi	2,692 kkal/kap/hari	kg/kap/hari	2,572	2,602	2,632	2,662	2,692	2,572	2,602				Penyelesaian dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Terwujudnya ketersediaan pangan lainnya dengan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Presentase ketersediaan pangan lainnya dengan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	%	100%	Kalender Ketahanan dan Ketahanan Pangan					
					Stabilitas Harga Pangan	%	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	100%	100%			Angka ketahanan energi	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Penyelesaian Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedia nya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4 Laporan	Sub Koordinator Ketersediaan Pangan					
					Meminimalisir Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Penyelesaian dan Harga Pangan	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Penyelesaian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terpadu	Tersedia nya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terpadu	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terpadu	Laporan	1 Laporan	Sub Koordinator Sumber Daya Pangan					
					Persepsi Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedia nya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	4 Dokumen	Sub Koordinator Harga Pangan					
					Persepsi Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Pengembangan Jejaringan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Pengembangan Jejaringan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tersedia nya Pengembangan Jejaringan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Jejaringan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Unit	1 Unit	Sub Koordinator Distribusi Pangan					
					Persepsi Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan	Tersedia nya Ketersediaan Cadangan pangan	Presentase Ketersediaan Cadangan Pangan	Tahun	20%	Kalender Ketahanan dan Ketahanan Pangan					
					Persepsi Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Tersedia nya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan	2 Laporan	Sub Koordinator Cadangan Pangan					
					Persepsi Ketahanan Pangan	%	84,5	90	87,0	88,3	89,6	89,5	89,7	101%	95%			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	67,68 gram/kap/hari	kg/kap/hari	65,8	66,18	66,68	67,18	67,68	65,8	66,18				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedia nya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	4 dokumen	Sub Koordinator Sumber Daya					

